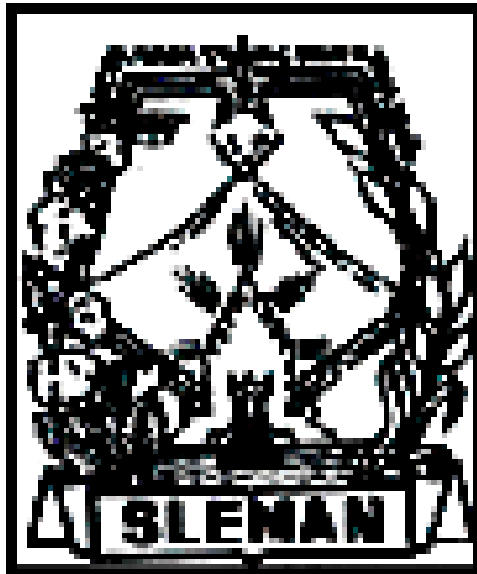




LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS
PERANGKAT DAERAH
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2022

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Sleman

Tahun 2022

KATA PENGANTAR

Laporan pelaksanaan tugas organisasi perangkat daerah disusun dalam rangka mewujudkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dalam laporan ini digambarkan realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan satuan organisasi perangkat daerah dalam mewujudkan visi dan misi. Di samping itu, laporan ini sebagai bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan bahan evaluasi.

Pada tahun 2022, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman mengelola anggaran sebesar Rp.49.736.892.757,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.47.199.355.295,70, atau sebesar 94,89%. Rendahnya serapan anggaran dikarenakan beberapa efisiensi yang sebagian besar diperoleh dari selisih nilai kontrak dengan pagu anggaran. Anggaran tersebut digunakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk melaksanakan tujuh program urusan perdagangan dan tiga program urusan perindustrian, 15 kegiatan urusan perdagangan, tiga kegiatan urusan perindustrian, 42 sub kegiatan urusan perdagangan dan lima sub kegiatan urusan perindustrian.

Demikian laporan ini disusun, semoga dapat dipergunakan sebagai bahan referensi dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait.

Sleman,

Kepala Dinas,



Dra. RR. MAE RUSMI S., M.T.

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP 19660529 199303 2 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	6
A. URUSAN PERDAGANGAN	6
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10
a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.....	11
b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.....	16
c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	19
d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	20
e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25
f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27
2. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan.....	30
a. Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	31
b. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang.....	32
c. Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota.	34
3. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	35
a. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan.....	37

b.	Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	40
4.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	43
a.	Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	44
5.	Program Pengembangan Ekspor	47
a.	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.	47
6.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.....	51
a.	Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	52
7.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.....	57
a.	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan.....	57
B.	URUSAN PERINDUSTRIAN.....	59
1.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	61
a.	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.....	63
2.	Program Pengendalian Usaha Industri Kabupaten/Kota.....	72
a.	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	73
3.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	75
a.	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	76
BAB III CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI.....		78
A.	IKK URUSAN PERDAGANGAN	78

B. IKK URUSAN PERINDUSTRIAN	81
BAB IV CAPAIAN PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN DANA KEISTIMEWAAN.....	86
BAB V TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ TAHUN ANGGARAN 2021	87
BAB VI PENUTUP.....	88
LAMPIRAN.....	89

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Anggaran, Realisasi Anggaran dan Capaian Tahun 2022	3
Tabel 1.2. Efisiensi Anggaran Tahun 2022	4
Tabel 2.1. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Perdagangan Tahun 2022.....	6
Tabel 2.2. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Renstra Urusan Perdagangan Tahun 2022	7
Tabel 2.3. Jumlah Sarana Prasarana Perdagangan Tahun 2018-2022	9
Tabel 2.4. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	10
Tabel 2.5. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	30
Tabel 2.6. Indikator, Target dan Realisasi Indikator Keluaran Sub Kegiatan Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang	33
Tabel 2.7. Indikator, Target dan Realisasi Indikator Keluaran Sub Kegiatan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2).....	35
Tabel 2.8. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	36
Tabel 2.9. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan.....	37
Tabel 2.10. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	38
Tabel 2.11. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan.....	39
Tabel 2.12. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan.....	41
Tabel 2.13. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan.....	42

Tabel 2.14. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	45
Tabel 2.15. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	46
Tabel 2.16. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Pameran Dagang Nasional	49
Tabel 2.17. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Peningkatan Citra Produk Ekspor.....	50
Tabel 2.18. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor.....	50
Tabel 2.19. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.....	51
Tabel 2.20. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	53
Tabel 2.21. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota.....	54
Tabel 2.22. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	55
Tabel 2.23. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	58
Tabel 2.24. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Perindustrian Tahun 2022	59
Tabel 2.25. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Renstra Urusan Perindustrian Tahun 2022	60
Tabel 2.26. Perkembangan Penyelenggaraan Urusan Perindustrian Tahun 2018-2022	60
Tabel 2.27. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	65

Tabel 2.28. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	66
Tabel 2.29. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat. 68	
Tabel 2.30. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	74
Tabel 5.1. Tindak Lanjut Tahun 2021 dan 2022 terhadap Rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Tahun 2021	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Anggaran dan Realisasi Anggaran Urusan Perdagangan	2
Gambar 2. Anggaran dan Realisasi Anggaran Urusan Perindustrian	2

BAB I PENDAHULUAN

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman dibentuk berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.4 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Peraturan Bupati tersebut, adalah sebagai berikut:

Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan.

Fungsi : 1. Penyusunan rencana kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan
3. Pelaksanaan, pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan
4. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan, dan
5. Pelaksanaan kesekretariatan dinas
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman menjalankan urusan pilihan. Urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Dari delapan urusan pilihan pada Peraturan Pemerintah tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten menjalankan dua urusan pilihan, yaitu industri dan perdagangan. Hal ini juga ditegaskan dalam Peraturan daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, dimana Dinas Perindustrian disebutkan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan.

Dalam penyelenggaraan urusan tersebut anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman Tahun 2022 adalah Rp.49.736.892.757,00. Dari anggaran tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp.47.199.355.295,70 atau dapat dikatakan dengan capaian anggaran sebesar 94,90%.

Anggaran untuk urusan perdagangan adalah sebesar Rp.39.741.768.210,00, dengan realisasi sebesar Rp. 38.137.789.185,00 atau dapat dikatakan capaian anggaran sebesar 95,96%. Sedangkan anggaran untuk urusan perindustrian adalah sebesar Rp.9.995.124.547,00, dengan realisasi Rp.9.061.566.111 atau dapat dikatakan capaian anggaran 90,66%.

Gambar 1. Anggaran dan Realisasi Anggaran Urusan Perdagangan



Gambar 2. Anggaran dan Realisasi Anggaran Urusan Perindustrian



Sedangkan anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan sampai dengan per program adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1. Anggaran, Realisasi Anggaran dan Capaian Tahun 2022

No	Jenis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	TOTAL	49.736.892.757	47.199.355.295,70	94,90
I	Urusan Perdagangan	39.741.768.210	38.137.789.185	95,96
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	27.112.412.325	26.126.283.643	96,36
2	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	398.178.311	395.083.220	99,22
3	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	8.055.528.804	7.468.166.017	92,71
4	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	895.210.946	890.633.838	99,49
5	Program Pengembangan Ekspor	559.224.433	558.538.035	99,88
6	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	545.819.963	545.257.783	99,90
7	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	2.175.393.428	2.153.826.649	99,01
II	Urusan Perindustrian	9.995.124.547	9.061.566.111	90,66
1	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	9.898.002.047	8.964.707.310,70	90,57
2	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	7.122.500	7.008.600	98,40
3	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	90.000.000	89.850.200	99,83

Capaian serapan anggaran yang dibawah 95%, disebabkan oleh adanya efisiensi anggaran yang sebagian besar berasal dari selisih nilai kontrak dibanding pagu anggaran (sisa negosiasi harga kontrak) pada beberapa sub kegiatan. Berikut efisiensi anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2022:

Tabel 1.2. Efisiensi Anggaran Tahun 2022

No	Sub Kegiatan	Efisiensi	Keterangan
1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	348.800.748	selisih nilai kontrak dibanding pagu anggaran (sisa negosiasi harga kontrak)
2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	38.551.050	Pengaturan jadwal masuk kru truck sampah dapat mengurangi kelebihan jam kerja
3	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	25.040.808	selisih nilai kontrak dibanding pagu anggaran (sisa negosiasi harga kontrak) pengadaan alat angkutan kendaraan bermotor, harga sewa bangunan kantor setelah appraisal di bawah pagu anggaran
4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	752.702.687	Sisa tender Dana Alokasi Khusus (DAK) pembangunan Rumah Promosi dan Wisata Edukasi

No	Sub Kegiatan	Efisiensi	Keterangan
			Sentra Jadah Tempe Kaliurang

BAB II CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN

A. URUSAN PERDAGANGAN

Pada urusan perdagangan, sesuai dengan Peraturan daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengampu indikator kinerja daerah berupa: nilai ekspor, persentase sarana dan prasarana perdagangan tradisional dikelola dengan baik, dan Persentase koefisien variasi harga antar waktu.

Target, realisasi dan capaian indikator kinerja daerah urusan perdagangan tersebut pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Perdagangan Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya produksi sektor industri dan perdagangan	Nilai ekspor	US \$ 47.148.000	US \$ 86.627.614,89	184%
		Persentase sarana dan prasarana perdagangan tradisional dikelola dengan baik	11,63%	13,5%	116%
2	Terjaganya stabilitas harga	Persentase koefisien variasi harga antar	≤ 5%	4,83	103%

No	Sasaran	Indikator sasaran	Target	Realisasi	Capaian
		waktu			

Sedangkan capaian indikator kinerja urusan perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Renstra Urusan Perdagangan Tahun 2022

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1	Tujuan: Memantapkan daya saing sektor perdagangan	Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu	$\leq 5\%$	4,83	103%
2		Persentase pelaku usaha perdagangan yang memiliki izin usaha	75,3	76,19	101%
3		Nilai Ekspor	US \$ 47.148.000	US \$ 86.627.614,89	184%
4		Persentase sarana dan prasarana perdagangan dikelola dengan baik	11,63%	13,5%	116%
5	Sasaran: Terjaganya	Koefisien variasi harga barang	$\leq 5\%$	4,83	103%

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
	stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan pokok	kebutuhan pokok antar waktu			
6	Sasaran: Meningkatnya daya saing sektor perdagangan	Persentase pelaku usaha perdagangan yang memiliki izin usaha	75,3	76,19	101%
7	Sasaran: Meningkatnya daya saing ekspor	Nilai ekspor Kabupaten Sleman	US \$ 47.148.000	US \$ 86.627.614,89	184%
8		Jumlah pelaku usaha perdagangan yang mendapat fasilitas pemasaran	10.330	11.110	107%
9	Sasaran: Meningkatnya pengelolaan sarana prasarana perdagangan Tradisional	Persentase sarana dan prasarana perdagangan dikelola dengan baik	11,63%	13,5%	116%

Dapat dilihat bahwa, indikator kinerja daerah urusan perdagangan yang menjadi ampuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta indikator Renstra dapat tercapai lebih dari 100%.

Sedangkan capaian perkembangan penyelenggaraan urusan perdagangan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3. Jumlah Sarana Prasarana Perdagangan Tahun 2018-2022

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pasar Desa	41	41	41	41	41
2	Pasar lokal/kabupaten	35	37	37	35	34
3	Pasar hewan	2	2	2	2	2
4	Usaha perdagangan milik pemerintah kabupaten	6	6	6	5	5
5	Toko Modern					
	a) Minimarket cabang/waralaba nasional	203	209	219	226	279
	b) Toko Modern local	184	187	212	213	214
	c) Pusat perbelanjaan	4	4	4	5	5
	d) Perbakulan/grosir	2	2	2	2	2
	e) <i>Hypermarket</i>	5	5	5	8	8
	f) <i>Supermarket</i>	12	14	14	21	21
	g) <i>DepartmenStore</i>	7	8	8	3	3

Dalam melaksanakan urusan perdagangan ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- Regulasi pergudangan sudah tidak sesuai dengan kondisi di lapangan
- Masih kurangnya kemampuan pengelolaan toko tradisional
- Pengembangan pasar ber-SNI dibutuhkan oleh masyarakat
- Literasi pedagang pasar akan platform online dan digital masih sangat rendah
- Sampah pasar perlu dikelola dan dipilah dengan lebih baik
- Konsep dari revitalisasi pasar masih perlu penyempurnaan (kearifan lokal dan cakupan pedagang)
- Cakupan dan kualitas program Tertib Ukur masih perlu ditingkatkan

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah melakukan upaya-upaya solusi sebagai berikut:

- Tahun 2022 disiapkan Naskah Akademik Raperda Gudang
- Dilakukan pelatihan/pelatihan dan Bimtek-bimtek untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha toko tradisional
- Disiapkan pasar untuk dapat di SNI-kan
- Dilakukan pendampingan kepada pedagang terkait platform online dan digital
- Dilakukan sosialisasi kepada pedagang pasar terkait pengelolaan sampah
- Mulai dikembangkan pasar rakyat yang tidak terlalu 'baku' dan 'masiv'. Contohnya Pasar Godean yang perencanaanya melalui sayembara
- Intensifikasi pelayanan tera/tera ulang

Program-program pada urusan perdagangan yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini merupakan program pendukung kesekretariatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas. Program ini terdiri dari enam kegiatan. Dimana satu kegiatan dilaksanakan kelompok Subtansi Perencanaan dan Evaluasi, satu kegiatan dilaksanakan oleh Sub Bagian Keuangan dan empat kegiatan dilaksanakan oleh Subag Umum dan Kepegawaian.

Pada tahun 2022 program ini dianggarkan sebesar Rp. 27.112.412.325,00, dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 26.126.283.643,00, atau dapat dikatakan tercapai 96,36%. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota

No	Indikator Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	100	100
2	Persentase pemenuhan layanan sarana	%	100	100	100

No	Indikator Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	dan prasarana kerja				

Dalam melaksanakan program tersebut ditemukan beberapa permasalahan yaitu: ketergantungan yang tinggi dengan seluruh unit kerja yang ada di Dinas, sementara seringkali masing-masing disibukkan dengan ketugasannya, kurang cepatnya updating data sebagai bahan penyusunan anggaran, sehingga terkadang kebutuhan dan yang dianggarkan tidak sinkron.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah melakukan upaya-upaya solusi yaitu koordinasi yang intensif dengan semua unit kerja dengan memanfaatkan berbagai media baik formal maupun informal, dan melakukan updating data lebih cepat agar dapat dijadikan bahan perencanaan anggaran yang akurat.

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang berupa penyusunan dokumen perencanaan (Renja, Renja Perubahan, dokumen perjanjian kinerja, dokumen perjanjian kinerja perubahan), penyusunan dokumen anggaran (RKA, perubahan RKA, DPA, perubahan DPA), and penyusunan dokumen evaluasi kinerja (Laporan tahunan, LKjIP, dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renja, Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja, Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja, serta penyusunan dokumen RFK)

Anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp.25.073.393,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.24.408.651,00, dengan capaian sebesar 97%.

Indikator Kinerja kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah: Dokumen perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target 35 dokumen, dan dapat tercapai 35 dokumen (100%), yaitu:

- 3 dokumen perjanjian kinerja,
- 3 dokumen perubahan perjanjian kinerja,
- 1 dokumen Renja,
- 1 dokumen perubahan Renja,
- 1 dokumen RKA SKPD,
- 1 dokumen perubahan RKA SKPD,
- 1 dokumen DPA SKPD, 1 dokumen perubahan DPA SKPD,
- 1 dokumen laporan tahunan
- 1 dokumen LKjIP
- 4 dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renja
- 1 dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja
- 4 dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja
- 12 dokumen RFK

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, permasalahan yang sering dihadapi adalah sulitnya untuk mengumpulkan seluruh sub koordinator kelompok substansi, Kepala Subbagian, Kepala Bidang dalam suatu rapat koordinasi yang menyeluruh, yang disebabkan oleh kesibukan pelaksanaan tugas masing-masing. Solusi yang dilakukan adalah mengintensifkan media komunikasi yang ada baik formal maupun informal untuk menyampaikan informasi penting dan mendesak. Atau apabila berkaitan dengan data, mengintensifkan staf untuk mencari data ke Bidang dengan pendekatan langsung.

i. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan ini merupakan kegiatan yang berupa penyusunan dokumen perencanaan Renja, Renja Perubahan, dokumen perjanjian kinerja, dokumen perjanjian kinerja perubahan.

Anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp.3.939.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.3.848.400,00, dengan capaian sebesar 97%.

Indikator dan target indikator keluaran Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah berupa:

- Dokumen Perjanjian Kinerja: 3 dokumen
- Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja : 3 dokumen

- Dokumen Renja : 1 dokumen
- Dokumen Perubahan Renja : 1 dokumen

Seluruh target tersebut dapat tercapai 100%.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah adalah sulitnya untuk mengumpulkan seluruh sub koordinator kelompok substansi, Kepala Subbagian, Kepala Bidang dalam suatu rapat koordinasi yang menyeluruh, yang disebabkan oleh kesibukan pelaksanaan tugas masing-masing, sistem yang dikembangkan kementerian seringkali *error*. Solusi yang dilakukan adalah mengintensifkan media komunikasi yang ada baik formal maupun informal untuk menyampaikan informasi penting dan mendesak, sedangkan terkait dengan sistem, dilakukan koordinasi yang intensif dengan admin sistem di Bappeda.

ii. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD.

Sub Kegiatan ini merupakan kegiatan yang berupa penyusunan dokumen RKA SKPD.

Anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp.2.919.900,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.2.820.900,00, dengan capaian sebesar 96%.

Indikator dan target indikator keluaran Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen RKA SKPD berupa dokumen RKA SKPD : 1 dokumen. Target tersebut dapat tercapai 100%.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan dokumen RKA SKPD adalah sistem yang digunakan seringkali mengalami *error*, intensitas penggunaan sistem yang jarang oleh operator sistem di luar Perencanaan dan Evaluasi menjadikan para operator masih kurang lancar dalam melakukan entry anggaran. Solusi yang dilakukan adalah mengintensifkan koordinasi dengan admin sistem di BKAD, dan pendampingan intensif terhadap operator sistem di perangkat daerah.

iii. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD.

Sub Kegiatan ini merupakan kegiatan yang berupa penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD.

Anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp.1.594.425,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.1.474.425,00, dengan capaian sebesar 92%. Rendahnya serapan anggaran dikarenakan efisiensi anggaran makan minum rapat dimana kebutuhan makan minum rapat untuk keperluan entry dokumen perubahan anggaran berkurang dikarenakan sistem yang sudah terintegrasi dan waktu penyelesaian RKA perubahan yang relatif pendek.

Indikator dan target indikator keluaran Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD berupa dokumen perubahan RKA SKPD : 1 dokumen. Target tersebut dapat tercapai 100%.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD adalah sistem yang digunakan seringkali mengalami *error*, intensitas penggunaan sistem yang jarang oleh operator sistem di luar Perencanaan dan Evaluasi menjadikan para operator masih kurang lancar dalam melakukan entry anggaran. Solusi yang dilakukan adalah mengintensifkan koordinasi dengan admin sistem di BKAD, dan pendampingan intensif terhadap operator sistem di perangkat daerah.

iv. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD.

Sub Kegiatan ini merupakan kegiatan yang berupa penyusunan dokumen DPA SKPD.

Anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp.2.989.898,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.2.911.500,00, dengan capaian sebesar 97%.

Indikator dan target indikator keluaran Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen DPA SKPD berupa dokumen DPA SKPD : 1 dokumen. Target tersebut dapat tercapai 100%.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan dokumen DPA SKPD adalah sistem yang digunakan seringkali mengalami *error*, intensitas

penggunaan sistem yang jarang oleh operator sistem di luar Perencanaan dan Evaluasi menjadikan para operator masih kurang lancar dalam melakukan entry anggaran. Solusi yang dilakukan adalah mengintensifkan koordinasi dengan admin sistem di BKAD, dan pendampingan intensif terhadap operator sistem di perangkat daerah.

v. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD.

Sub Kegiatan ini merupakan kegiatan yang berupa penyusunan dokumen Perubahan DPA SKPD.

Anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp.1.759.920,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.1.687.200,00, dengan capaian sebesar 95%.

Indikator dan target indikator keluaran Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD berupa dokumen Perubahan DPA SKPD : 1 dokumen. Target tersebut dapat tercapai 100%.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan dokumen Perubahan DPA SKPD adalah sistem yang digunakan seringkali mengalami *error*, intensitas penggunaan sistem yang jarang oleh operator sistem di luar Perencanaan dan Evaluasi menjadikan para operator masih kurang lancar dalam melakukan entry anggaran. Solusi yang dilakukan adalah mengintensifkan koordinasi dengan admin sistem di BKAD, dan pendampingan intensif terhadap operator sistem di perangkat daerah.

vi. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan ini merupakan kegiatan yang berupa penyusunan dokumen laporan tahunan, dokumen LKjIP, dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil renja, dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja, dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan renja, serta penyusunan dokumen RFK.

Anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp.11.870.250,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.11.666.226,00, dengan capaian sebesar 98%.

Indikator dan target indikator keluaran Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah berupa:

- Dokumen laporan tahunan: 1 dokumen
- Dokumen LKjIP: 1 dokumen
- Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renja: 4 dokumen
- Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja: 1 dokumen
- Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja: 4 dokumen
- Dokumen RFK: 12 dokumen

Seluruh target tersebut dapat terpenuhi dengan capaian 100%.

Permasalahan yang dihadapi dalam Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah sulitnya memperoleh data dari bidang-bidang pengampu yang disebabkan oleh kesibukan bidang dalam melaksanakan tugas. Solusi yang dilakukan adalah dengan secara intensif menghubungi langsung bidang pemilik data agar data bisa segera diperoleh.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang berupa penyediaan gaji dan tunjangan PNS, pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang, penyusunan laporan keuangan audited, penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan barang milik SKPD, penyusunan Laporan asset/BMN semesteran, penyusunan Laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran, penyusunan laporan keuangan, penyusunan LPJ penerimaan, dan penyusunan LPJ pengeluaran.

Anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp.17.518.597.235,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.16.907.583.136,00, dengan capaian sebesar 96%.

Indikator Kinerja kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah adalah: Laporan Keuangan dengan target 12 bulan, dan dapat tercapai 12 bulan (100%)

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, permasalahan yang sering dihadapi adalah:

- Dalam penyusunan laporan keuangan, LPJ penerimaan harus dilaporkan di akhir tahun, sementara transaksi penerimaan akhir tahun baru tercatat awal tahun berikutnya

- Penyajian data aset yang seingkali kurang cepat diupdate

Solusi yang dilakukan adalah melakukan rekonsiliasi aset secara rutin antara pengurus barang dengan Bidang Aset BKAD

i. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub Kegiatan ini merupakan kegiatan yang berupa pembayaran gaji dan tunjangan PNS

Anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp.17.074.519.500,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.16.468.423.038,00, dengan capaian sebesar 96,65%.

Indikator dan target indikator keluaran Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah pembayaran gaji dan tunjangan PNS: 12 bulan. Target tersebut dapat tercapai 100%.

Permasalahan yang dihadapi dalam Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan PNS adalah: untuk pembayaran jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan terdapat data yang kurang sesuai

Solusi yang dilakukan adalah pendataan dan penertiban administrasi keikutsertaan pegawai dalam jaminan tersebut.

ii. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Sub Kegiatan ini merupakan kegiatan yang berupa pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang.

Anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp.430.769.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.426.035.950,00, dengan capaian sebesar 98%.

Indikator dan target indikator keluaran Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD adalah pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang: 12 bulan. Target tersebut dapat tercapai 100%.

Permasalahan yang dihadapi dalam sub kegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD adalah

honorarium menyesuaikan anggaran karena terlewat menyesuaikan pada anggaran perubahan adanya perubahan jumlah anggaran yang dikelola.

Solusi yang dilakukan adalah mempersiapkan perhitungan yang terperinci menyesuaikan anggaran yang tersedia

iii. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Sub Kegiatan ini merupakan kegiatan yang berupa penyediaan Laporan Keuangan audited untuk keperluan pemeriksaan.

Anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp.1.686.960,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.1.637.100,00, dengan capaian sebesar 97%.

Indikator dan target indikator keluaran Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan adalah laporan keuangan audited: 2 dokumen. Target tersebut dapat tercapai 100%.

Permasalahan yang dihadapi dalam sub kegiatan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan adalah terkadang laporan belum selesai sampai dengan waktu yang telah ditentukan.

Solusi yang dilakukan adalah mempersiapkan secara intensif laporan yang diperlukan untuk bahan pemeriksaan agar bisa selesai tepat waktu.

iv. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Sub Kegiatan ini merupakan kegiatan yang berupa penyusunan dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik SKPD, Laporan Aset / BMN semesteran, Laporan dan analisis Prognosis Realisasi Anggaran, Laporan Keuangan, LPJ Penerimaan, dan LPJ Pengeluaran

Anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp.11.621.775,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.11.487.048,00, dengan capaian sebesar 98%.

Indikator dan target indikator keluaran Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD adalah:

- dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik SKPD: 1 dokumen

- Laporan Aset / BMN semesteran: 2 dokumen
- Laporan dan analisis Prognosis Realisasi Anggaran: 12 bulan
- Laporan Keuangan: 2 dokumen
- LPJ Penerimaan: 12 bulan
- LPJ Pengeluaran: 12 bulan

Seluruh target tersebut dapat tercapai 100%.

Permasalahan yang dihadapi dalam sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD adalah Penyelesaian Laporan Keuangan terkendala SPJ penerimaan pada perhitungan piutang penerimaan tahun-tahun sebelumnya yang belum dibayarkan sampai dengan tahun 2022, dan LPJ pengeluaran termin pembayaran akhir tahun.

Solusi yang dilakukan adalah : diupayakan agar SPJ penerimaan piutang bisa dicatat setiap bulan agar memudahkan dan mempercepat rekap penyusunan SPJ penerimaan

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang berupa pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian.

Anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp.3.113.732.290,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.3.032.832.721,00, dengan capaian sebesar 97%.

Indikator Kinerja kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah adalah: Layanan administrasi kepegawaian dan Pembayaran tenaga non PNS / PHL: 12 bulan, dan dapat tercapai 12 bulan (100%)

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, permasalahan yang sering dihadapi adalah kurang responnya pegawai dalam memenuhi dokumen-dokumen kepegawaian baik untuk keperluan Dinas maupun dalam rangka memenuhi permintaan BKPP

Solusi yang dilakukan adalah secara intensif mengingatkan kepada pegawai untuk memenuhi dokumen kepegawaian sesuai yang diperlukan sebelum tenggat waktu yang telah ditentukan.

- i. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Sub Kegiatan ini merupakan kegiatan yang berupa penyusunan laporan pelaksanaan roadmap reformasi birokrasi, layanan administrasi kepegawaian dan pembayaran tenaga Non PNS/PHL.

Anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp.3.113.732.290,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.3.032.832.721,00, dengan capaian sebesar 97%.

Indikator dan target indikator keluaran Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian adalah:

- laporan pelaksanaan roadmap reformasi birokrasi: 1 dokumen
- layanan administrasi kepegawaian: 12 bulan
- pembayaran tenaga Non PNS/PHL: 12 bulan

Seluruh target tersebut dapat tercapai 100%

Permasalahan yang dihadapi dalam Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian adalah kurang responnya pegawai dalam memenuhi dokumen-dokumen kepegawaian baik untuk keperluan Dinas maupun dalam rangka memenuhi permintaan BKPP

Solusi yang dilakukan adalah secara intensif mengingatkan kepada pegawai untuk memenuhi dokumen kepegawaian sesuai yang diperlukan sebelum tenggat waktu yang telah ditentukan

- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang berupa penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan bahan logistik kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, fasilitasi kunjungan tamu, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, penatausahaan arsip dinamis pada SKPD, dan dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD .

Anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp.605.777.550,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.587.805.665,00, dengan capaian sebesar 97%.

Indikator Kinerja kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah:
Layanan administrasi umum: 12 bulan, dan dapat tercapai 12 bulan (100%)

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, permasalahan yang sering dihadapi adalah ketergantungan kepada berbagai pihak di Dinas, sementara seringkali masing-masing terlalu sibuk dengan ketugasannya.

Solusi yang dilakukan adalah mengoptimalkan dan mengintensifkan koordinasi melalui berbagai media formal maupun non formal.

i. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sub Kegiatan ini merupakan kegiatan yang berupa penyediaan alat listrik.

Anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp.22.620.631,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.22.608.400,00, dengan capaian sebesar 97%.

Indikator dan target indikator keluaran Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor adalah penyediaan alat listrik: 19 jenis. Target tersebut dapat tercapai 100%

Permasalahan yang dihadapi dalam Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor adalah keterbatasan pegawai yang mengerti tentang kelistrikan sehingga seringkali ketika ada gangguan kecil yang tidak perlu dengan pemeliharaan tidak dapat diselesaikan dengan cepat.

Solusi yang dilakukan adalah pemantauan rutin agar kerusakan komponen listrik dapat terdeteksi dengan lebih cepat sehingga dapat lebih cepat ditangani.

ii. Sub Kegiatan Penyediaan bahan Logistik Kantor

Sub Kegiatan ini merupakan kegiatan yang berupa penyediaan alat tulis kantor, dan penyediaan makanan dan minuman rapat.

Anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp.284.928.829,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.268.962.560,00, dengan capaian sebesar 94%.

Capaian serapan yang rendah dikarenakan adanya efisiensi dari sisa kontrak pengadaan ATK.

Indikator dan target indikator keluaran Sub Kegiatan Penyediaan bahan Logistik Kantor adalah ATK: 3 paket dan penyediaan makanan dan minuman rapat: 12 bulan. Seluruh target tersebut dapat tercapai 100%

Permasalahan yang dihadapi dalam Sub Kegiatan Penyediaan bahan Logistik Kantor adalah sulitnya penerapan pembelian makan minum melalui MBiz market yang dikarenakan seringnya kebutuhan makan minum yang munculnya mendadak pada hari-H sementara sebagian besar penyedia di Mbiz menghendaki order H-2

Solusi yang dilakukan adalah Koordinasi agar rapat/pertemuan bisa diagendakan secara pasti

iii. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sub Kegiatan ini merupakan kegiatan yang berupa layanan cetak dan penggandaan dokumen.

Anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp.6.224.625,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.6.195.750,00, dengan capaian sebesar 99%.

Indikator dan target indikator keluaran Sub Kegiatan Penyediaan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan adalah layanan cetak dan penggandaan dokumen: 12 bulan. Target tersebut dapat tercapai 100%

Permasalahan yang dihadapi dalam Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan adalah seringkali muncul kebutuhan barang cetakan di luar yang direncanakan

Solusi yang dilakukan adalah direncanakan untuk penyediaan tahun berikutnya.

iv. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu

Sub Kegiatan ini merupakan kegiatan yang berupa penyediaan makanan dan minuman untuk tamu.

Anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp.36.810.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.36.282.485,00, dengan capaian sebesar 98%.

Indikator dan target indikator keluaran Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu adalah penyediaan makanan dan minuman tamu: 12 bulan. Target tersebut dapat tercapai 100%

Permasalahan yang dihadapi dalam Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu adalah seringkali tamu yang datang tidak sesuai surat permohonan (tidak tepat jadwal dan tidak tepat jumlah orang yang datang) sehingga seringkali harus pengadaan tambahan secara mendadak.

Solusi yang dilakukan adalah koordinasi yang intensif dengan pihak tamu yang akan berkunjung.

- v. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sub Kegiatan ini merupakan kegiatan yang berupa layanan perjalanan dinas dalam daerah dan layanan perjalanan dinas luar daerah.

Anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp.199.608.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.199.579.428,00, dengan capaian sebesar 99%.

Indikator dan target indikator keluaran Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah layanan perjalanan dinas dalam daerah: 12 bulan, dan layanan perjalanan dinas luar daerah: 12 bulan. Seluruhtarget tersebut dapat tercapai 100%

Permasalahan yang dihadapi dalam Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah seringkali undangan koordinasi yang mendadak, sehingga persiapan administrasi dan persiapan pembayaran menjadi kurang siap.

Solusi yang dilakukan adalah mengawal kelengkapan administrasi agar bisa segera terselesaikan, pembiayaan dicukupi dulu baru dilakukan *reimburse*.

- vi. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Sub Kegiatan ini merupakan kegiatan yang berupa pengelolaan arsip dan perpustakaan.

Anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 29.496.765,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 29.361.292,00, dengan capaian sebesar 99%.

Indikator dan target indikator keluaran Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD adalah pengelolaan arsip: 12 bulan . Target tersebut dapat tercapai 100%

Permasalahan yang dihadapi dalam Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD adalah belum adanya tenaga arsiparis di Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Solusi yang dilakukan adalah mengoptimalkan pegawai yang ada untuk mengelola arsip Dinas

vii. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Sub Kegiatan ini merupakan kegiatan yang berupa pengelolaan informasi dan dokumen perangkat daerah, serta pengelolaan website.

Anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp.26.088.700,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.24.815.750,00, dengan capaian sebesar 95%.

Indikator dan target indikator keluaran Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD adalah pengelolaan informasi dan dokumen perangkat daerah: 12 bulan serta pengelolaan website. Seluruh target tersebut dapat tercapai 100%

Permasalahan yang dihadapi dalam Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD adalah masih kurangnya kelengkapan informasi dari bidang-bidang selaku sumber informasi kegiatan untuk bahan berita website, masih kurangnya respon pemilik informasi dan data dalam menanggapi permohonan informasi publik.

Solusi yang dilakukan adalah pendekatan yang intensif staf untuk menggali informasi yang lebih detil kepada bidang dalam pembuatan berita website, dalam hal menyiapkan data sesuai permohonan informasi publik juga dilakukan pendekatan yang intensif kepada pemilik data.

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang berupa penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik, penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan jasa pelayanan umum kantor

Anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp.5.003.337.857,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.4.761.951.189,00, dengan capaian sebesar 95%.

Indikator Kinerja kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah: Layanan jasa penunjang: 12 bulan, dan dapat tercapai 12 bulan (100%)

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, permasalahan yang sering dihadapi adalah kebutuhan air bersih Pasar Prabanan yang cukup besar sementara ketersediaan air bersih sangat kurang, sehingga harus dipenuhi dengan pembelian air tangki yang cukup memakan biaya.

Solusi yang dilakukan adalah menambah pompa air yang besar pada sumur yang bisa menghasilkan air bersih dan berkoordinasi dengan PDAM Sleman agar dapat disuplai air bersih, serta menghimbau kepada pedagang untuk lebih hemat air.

i. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sub Kegiatan ini merupakan kegiatan yang berupa layanan surat menyurat.

Anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp.26.694.250,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.26.652.000,00, dengan capaian sebesar 99%.

Indikator dan target indikator keluaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah layanan surat menyurat: 12 bulan. Target tersebut dapat tercapai 100%

Permasalahan yang dihadapi dalam Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah belum diterapkannya srikandi, sehingga seringkali surat sultit dicari kembali pada pihak penerima surat.

Solusi yang dilakukan adalah mensosialisasikan srikandi

- ii. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sub Kegiatan ini merupakan kegiatan yang berupa pembayaran jasa langganan.

Anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp.1.000.908.900,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.931.585.310,00, dengan capaian sebesar 93%. Capaian realisasi keuangan yang rendah dikarenakan kebutuhan akan air tangki di Pasar Prambanan selain dilakukan dengan pembelian air tangki juga dibarengi dengan koordinasi dengan PDAM dan pengadaan pompa yang lebih besar, sehingga kebutuhan air bersih dari pembelian air tangki berkurang.

Indikator dan target indikator keluaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah pembayaran jasa langganan: 12 bulan. Target tersebut dapat tercapai 100%

Permasalahan yang dihadapi dalam Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah kebutuhan air bersih Pasar Prambanan yang cukup besar sementara ketersediaan air bersih sangat kurang, sehingga harus dipenuhi dengan pembelian air tangki yang cukup memakan biaya.

Solusi yang dilakukan adalah menambah pompa air yang besar pada sumur yang bisa menghasilkan air bersih dan berkoordinasi dengan PDAM Sleman agar dapat disuplai air bersih, serta menghimbau kepada pedagang untuk lebih hemat air.

- iii. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sub Kegiatan ini merupakan kegiatan yang berupa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor.

Anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp.157.050.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.156.695.700,00, dengan capaian sebesar 99%.

Indikator dan target indikator keluaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor: 12 bulan. Target tersebut dapat tercapai 100%

Permasalahan yang dihadapi dalam Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah anggaran yang tersedia kurang mencukupi untuk pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor.

Solusi yang dilakukan adalah skala prioritas berdasarkan tingkat pentingnya dan mendesaknya peralatan dan perlengkapan kantor.

iv. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sub Kegiatan ini merupakan kegiatan yang berupa pelayanan keamanan dan kebersihan kantor.

Anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp.3.818.684.707,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.3.647.018.179,00, dengan capaian sebesar 95%.

Indikator dan target indikator keluaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor adalah pelayanan keamanan dan kebersihan kantor: 12 bulan. Target tersebut dapat tercapai 100%

Permasalahan yang dihadapi dalam Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor adalah banyaknya tenaga keamanan dan kebersihan yang dimiliki yang tersebar di Dinas dan UPTD Pelayanan Pasar sehingga rentang kendali untuk pembinaan dan pengawasan kepegawaian terlalu luas.

Solusi yang dilakukan adalah Koordinasi yang intensif dengan UPTD Pelayanan Pasar dan Kelompok Subtansi Keamanan dan Kebersihan Perdagangan Tradisional

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang berupa penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, pemeliharaan mebel, pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.

Anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp.845.894.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.811.702.281,00, dengan capaian sebesar 95%.

Indikator Kinerja kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah: Layanan pemeliharaan BMD: 12 bulan, dan dapat tercapai 12 bulan (100%)

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, permasalahan yang sering dihadapi adalah kurang cermatan dalam penyusunan kebutuhan akan pajak kendaraan, dimana kendaraan dengan pajak tahunan dianggarkan pajak lima tahunan, kurang cermatnya pembagian BBM operasional kegiatan sehingga terdapat unit kerja yang kekurangan dan unit kerja yang kurang mampu menyerap, anggaran pemeliharaan mebel kurang seimbang dengan banyaknya mebel yang perlu dilakukan pemeliharaan, serta sulitnya memprediksi kebutuhan akan pemeliharaan gedung kantor

Solusi yang dilakukan adalah lebih menertibkan data agar dapat dilakukan perencanaan anggaran yang lebih akurat, evaluasi berkala serapan anggaran BBM, apabila diperlukan, dilakukan perhitungan ulang pembagian distribusi antar unit. Kerja, melakukan pemeliharaan mebel berdasar prioritas, dan pemantauan rutin kondisi bangunan gedung kantor.

- i. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sub Kegiatan ini merupakan kegiatan yang berupa layanan pemeliharaan kendaraan dinas dan layanan penyediaan BBM kendaraan.

Anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp.572.210.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.539.420.522,00, dengan capaian sebesar 94%. Serapan anggaran yang rendah dikarenakan pengeluaran pajak kendaraan tidak sesuai yang diperkirakan karena tidak semua kendaraan masuk periode perpanjangan 5 tahunan

Indikator dan target indikator keluaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan adalah layanan pemeliharaan

kendaraan dinas: 12 bulan dan layanan penyediaan BBM kendaraan 12 bulan. Semua target tersebut dapat tercapai 100%

Permasalahan yang dihadapi dalam Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan adalah kurang cermatan dalam penyusunan kebutuhan akan pajak kendaraan, dimana kendaraan dengan pajak tahunan dianggarkan pajak lima tahunan, kurang cermatnya pembagian BBM operasional kegiatan sehingga terdapat unit kerja yang kekurangan dan unit kerja yang kurang mampu menyerap.

Solusi yang dilakukan adalah lebih menertibkan data agar dapat dilakukan perencanaan anggaran yang lebih akurat, evaluasi berkala serapan anggaran BBM, apabila diperlukan, dilakukan perhitungan ulang pembagian distribusi antar unit. Kerja

ii. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel

Sub Kegiatan ini merupakan kegiatan yang berupa layanan pemeliharaan mebel.

Anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp.20.500.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.20.370.979,00, dengan capaian sebesar 99%.

Indikator dan target indikator keluaran Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel adalah layanan pemeliharaan mebel: 12 bulan. Target tersebut dapat tercapai 100%

Permasalahan yang dihadapi dalam Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel adalah anggaran pemeliharaan mebel kurang seimbang dengan banyaknya mebel yang perlu dilakukan pemeliharaan

Solusi yang dilakukan adalah melakukan pemeliharaan mebel berdasar prioritas

iii. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sub Kegiatan ini merupakan kegiatan yang berupa pemeliharaan Gedung kantor dan pemeliharaan taman.

Anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp.253.184.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.251.910.780,00, dengan capaian sebesar 99%.

Indikator dan target indikator keluaran Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya adalah layanan pemeliharaan Gedung kantor: 2 unit, dan pemeliharaan tamab: 2 unit. Semua target tersebut dapat tercapai 100%

Permasalahan yang dihadapi dalam Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya adalah sulitnya memprediksi kebutuhan akan pemeliharaan gedung kantor

Solusi yang dilakukan adalah pemantauan rutin kondisi bangunan gedung kantor

2. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Program ini merupakan program pendukung di dua bidang, yaitu Bidang Usaha Perdagangan dan Bidang Pengelolaan Fasilitas Perdagangan Tradisional. Program ini terdiri dari tiga kegiatan, dimana dua kegiatan di Bidang Usaha Perdagangan dan satu kegiatan di Pengelolaan Fasilitas Perdagangan Tradisional

Pada tahun 2022 program ini dianggarkan sebesar Rp.398.178.311,00, dan dapat direalisasikan sebesar Rp.395.083.220,00, atau dapat dikatakan tercapai 99,2%. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

No	Indikator Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	%	36,32	43,89	120,8
2	Persentase pedagang pasar yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	%	77	75,85	98,5

Dalam melaksanakan program tersebut ditemukan beberapa permasalahan berupa proses perizinan pedagang pasar (SPTD) yang sangat tergantung dengan proses penataan pasar dan pedagang pasar, masih rendahnya pemahaman pengusaha bahwa perizinan tidak hanya semata NIB (Nomer Induk Berusaha) tetapi masih rendahnya pemahaman pengusaha bahwa perizinan tidak hanya semata NIB (Nomer Induk Berusaha) tetapi masih harus diikuti dengan ijin teknis.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah melakukan upaya-upaya solusi berupa koordinasi secara intensif dengan Kelompok substansi penataan perdagangan tradisional, dan sosialisasi di lapangan terkait perijinan teknis pada saat pemantauan.

a. Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik

Anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp.166.316.061,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.163.927.470,00, dengan capaian sebesar 98,5%.

Indikator kinerja kegiatan Penerbitan izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan adalah: pelayanan perizinan SPTD dengan target 2.400 SPTD, tercapai 1.774 SPTD atau 73,9%.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, permasalahan yang dihadapi sehingga capaian kinerja jauh dari target adalah proses penataan Pasar Prambanan yang belum selesai untuk lantai tiga dan sebagian lantai 2, dan masih berjalannya pengurusan SPTD Pasar Potrojayan. Solusi yang dilakukan adalah melakukan koordinasi yang intensif dengan bidang yang menangani penataan pedagang pasar.

i. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Sub Kegiatan ini merupakan kegiatan yang berupa pelayanan SPTD dan pendampingan administrasi bagi pengelola retribusi.

Anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp.166.316.061,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.163.927.470,00, dengan capaian sebesar 98,5%.

Indikator dan target indikator keluaran Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik berupa pelayanan perizinan SPTD: 2.400 SPTD, dan pendampingan administrasi bagi pengelola retribusi: 63 orang. Target pelayanan perizinan SPTD: 2.400 SPTD hanya dapat terrealisasi 1.774 SPTD (73,9%), sedangkan target pendampingan administrasi bagi pengelola retribusi: 63 orang dapat tercapai 100%

Permasalahan yang dihadapi Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik adalah proses penataan Pasar Prambanan yang belum selesai untuk lantai tiga dan sebagian lantai 2, dan masih berjalannya pengurusan SPTD Pasar Potrojayan. Sedangkan dalam pendampingan administrasi bagi pengelola retribusi adalah keterbatasan personil yang berada di Kelompok Substansi Retribusi Perdagangan Tradisional.

Solusi yang dilakukan adalah melakukan koordinasi yang intensif dengan bidang yang menangani penataan pedagang pasar, dan penjadwalan yang intensif untuk pendampingan administrasi.

b. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang fasilitasi penerbitan tanda daftar gudang.

Anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp.142.507.300,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.142.507.300,00, dengan capaian sebesar 100%.

Indikator Kinerja kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang adalah: 20 TDG, tercapai 100%

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, permasalahan yang dihadapi adalah masih rendahnya pemahaman pengusaha bahwa perizinan tidak hanya semata NIB (Nomer Induk Berusaha) tetapi masih harus diikuti dengan ijin teknis Tanda Daftar Gudang.

Solusi yang dilakukan adalah sosialisasi dilapangan pada saat pemantauan. Dan diterbitkan Surat Peringatan untuk mengurus Tanda Daftar Gudang

i. Sub Kegiatan Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang.

Sub Kegiatan ini merupakan kegiatan yang berupa monitoring distributor minuman beralkohol, monitoring ijin usaha perdagangan, monitoring TDG, dan menertibkan toko modern..

Anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp.142.507.300,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.142.507.300,00, dengan capaian sebesar 100%.

Indikator, target dan realisasi indikator keluaran Sub Kegiatan Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang adalah sebagai berikut::

Tabel 2.6. Indikator, Target dan Realisasi Indikator Keluaran Sub Kegiatan Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Distribusi minuman beralkohol yang dimonitor	15 ijin	20 ijin	133,33%
2	Ijin usaha perdagangan yang dimonitor	60 ijin SIUP	72 ijin SIUP	120%
3	TDG yang dimonitor	20 TDG	20 TDG	100%
4	Toko modern yang ditertibkan	15 toko	15 toko	100%

Permasalahan yang dihadapi Sub Kegiatan Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang adalah masih rendahnya pemahaman pengusaha bahwa perizinan tidak hanya semata NIB (Nomer Induk Berusaha) tetapi masih harus diikuti dengan ijin teknis Tanda Daftar Gudang.

Solusi yang dilakukan adalah sosialisasi lapangan pada saat pemantauan. Dan diterbitkan Surat Peringatan untuk mengurus Tanda Daftar Gudang

- c. Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota.

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang berupa pengawasan distribusi pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya terhadap pengguna akhir bahan berbahaya (PA-B2) maupun produsen B2 (P-B2).

Anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp.89.354.950,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.88.648.450,00, dengan capaian sebesar 99,2%.

Indikator Kinerja kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota adalah: Laporan monitoring pengawasan pangan dan bahan berbahaya, tercapai 100%

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, permasalahan yang ditemukan adalah masih rendahnya kesadaran pedagang akan perlindungan konsumen, sehingga seringkali masih ditemui pedagang tetap memperjual belikan makanan yang mengandung bahan berbahaya.

Solusi yang dilakukan adalah dilakukan monitoring dan pembinaan di lapangan, melibatkan paguyuban pedagang pasar dalam pengujian bahan berbahaya.

- i. Sub Kegiatan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2).

Sub Kegiatan ini merupakan kegiatan yang berupa monitoring pengawasan pangan dan bahan berbahaya, pengawasan pangan dan bahan berbahaya dan sosialisasi bahan berbahaya..

Anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp.89.354.950,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.88.648.450,00, dengan capaian sebesar 99,2%.

Indikator, target dan realisasi indikator keluaran Sub Kegiatan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) adalah sebagai berikut::

Tabel 2.7. Indikator, Target dan Realisasi Indikator Keluaran Sub Kegiatan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Laporan monitoring pengawasan pangan dan bahan berbahaya	1 dok	1 dok	100%
2	Lokasi pengawasan pangan dan bahan berbahaya	2 lokasi PKL	2 lokasi PKL	100%
3	Lokasi pengawasan pangan dan bahan berbahaya	27 pasar	27 pasar	100%
4	Sosialisasi bahan berbahaya	3pasar	3 pasar	100%

Permasalahan yang dihadapi Sub Kegiatan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) adalah masih rendahnya kesadaran pedagang akan perlindungan konsumen, sehingga seringkali masih ditemui pedagang tetap memperjual belikan makanan yang mengandung bahan berbahaya.

Solusi yang dilakukan adalah dilakukan monitoring dan pembinaan di lapangan, melibatkan paguyuban pedagang pasar dalam pengujian bahan berbahaya

3. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program ini merupakan program pendukung di Bidang Pengelolaan Fasilitas Perdagangan Tradisional. Program ini terdiri dari dua kegiatan.

Pada tahun 2022 program ini dianggarkan sebesar Rp.8.055.528.804,00, dan dapat direalisasikan sebesar Rp.7.468.166.017,00, atau dapat dikatakan tercapai 94,9%. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

No	Indikator Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Rasio sarana prasarana perdagangan tradisional dalam kondisi baik	Rasio	0,88	0,8	91%
2	Jumlah kejadian gangguan keamanan yang terjadi di sarana prasarana perdagangan tradisional	Kejadian	5	5	100%
3	Rasio sarana prasarana perdagangan tradisional yang menerapkan pengelolaan sampah	%	11,63	13,5	116%
4	Cakupan pembinaan pedagang pasar dan sarana usaha milik pemerintah Kabupaten Sleman	%	2,76	4,74	171,7%
5	Jumlah sarana dan prasarana perdagangan tradisional tertata	Pasar	15	29	193,3

Dalam melaksanakan program tersebut ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- Rasio anggaran pemeliharaan rutin pasar dibanding nilai bangunan pasar sangat kecil, sehingga pemeliharaan dilaksanakan dengan menggunakan skala prioritas. Nilai bangunan pasar Rp 216.489.986.968,45 anggaran belanja pemeliharaan rutin pasar Rp 970.062.200,00 atau 0,45%

- dinamisnya perkembangan pembahasan rencana pembangunan Pasar Godean dengan Pemerintah Pusat (Kementerian PUPR)
- Belum adanya tempat pengelolaan sampah di Kabupaten sehingga pembuangan sampah pasar masih tergantung pada TPA Piyungan sementara beberapa kali TPA Piyungan ditutup untuk pelayanan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah melakukan upaya-upaya solusi sebagai berikut:

- Pemeliharaan ruitn pasar dilaksanakan dengan mendahulukan perbaikan untuk kerusakan-kerusakan di dasaran yang lebih mempengaruhi proses jual beli.
- koordinasi intensif dengan pusat dan Tim Anggaran Kabupaten Sleman
- Menyediakan lahan pasar untuk penampungan sampah sementara ketika TPA Piyungan tutup pelayanan.

a. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang berada di Bidang Pengelolaan Fasilitas Perdagangan Tradisional untuk penyediaan sarana distribusi perdagangan, dan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan.

Anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp.7.435.713.451,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.6.875.266.521,00, dengan capaian sebesar 92,4%.Anggaran tidak terserap maksimal dikarenakan adanya efisiensi anggaran dari selisih pagu anggaran dengan nilai kontrak.

Indikator Kinerja kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan adalah:

Tabel 2.9. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

No	Indikator Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Rasio pasar dipelihara terhadap target pasar yang perlu dipelihara	Rasio	0,72	0,8	111,1%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan UPTD Pelayanan Pasar	Indeks	82,8	84,33	101,8%

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, permasalahan yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran pemeliharaan rutin pasar, dinamisnya perkembangan pembahasan rencana pembangunan Pasar Godean dengan Pemerintah Pusat (Kementerian PUPR), sehingga seringkali harus diikuti dengan revisi DPA.

Solusi yang dilakukan adalah pemeliharaan pasar dilaksanakan berdasarkan prioritas yang lebih mempengaruhi aktivitas pedagang, dan koordinasi intensif dengan pusat dan Tim Anggaran Kabupaten Sleman

i. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan

Sub Kegiatan ini merupakan kegiatan yang berupa pemeliharaan bangunan pasar, monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana pasar tradisiobal, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, pengawasan pembangunan, pembangunan sarpras pasar tradisional.

Anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp.5.345.422.952,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.4.880.079.340,00, dengan capaian sebesar 91,29%. Rendahnya serapan keuangan dikarenakan adanya efisiensi anggaran dari selisih pagu anggaran dengan nilai kontrak.

Indikator, target dan realisasi keluaran Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.10. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan

No	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Bangunan pasar terpelihara dengan baik	Pasar	31	31	100%
2	DED Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	1	1	100%
3	Fisik Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan	Lokasi	1	1	100%
4	Laporan monitoring dan evaluasi sarana	Dokumen	1	1	100%

No	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	dan prasarana pasar tradisional				
5	Pemeliharaan Eskalator Pasar Prambanan	Unit	2	2	100%
6	Pengawasan Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan	Lokasi	1	1	100%
7	Perencanaan Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	1	1	100%

Permasalahan yang dihadapi Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan adalah dinamisnya perkembangan pembahasan rencana pembangunan Pasar Godean dengan Pemerintah Pusat (Kementerian PUPR), sehingga seringkali harus diikuti dengan revisi DPA.

Solusi yang dilakukan adalah koordinasi intensif dengan pusat dan Tim Anggaran Kabupaten Sleman.

ii. Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Sub Kegiatan ini merupakan kegiatan yang berupa evakuasi sampah pasar, dan monitoring keamanan pasar, dan pelayanan UPTD Pelayanan Pasar Wilayah I - Wilayah V

Anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp.2.090.290.499,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.1.995.187.181,00, dengan capaian sebesar 95,4%.

Indikator, target dan realisasi keluaran Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.11. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

No	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Evakuasi sampah pasar	UPTD	5	5	100%

No	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2	Gerakan bersih pasar	Kali	25	25	100%
3	Laporan monitoring kesiagaan petugas keamanan pasar	Pasar	3	3	100%

Permasalahan yang dihadapi Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan adalah belum adanya tempat pengelolaan sampah di Kabupaten sehingga pembuangan sampah pasar masih tergantung pada TPA Piyungan sementara beberapa kali TPA Piyungan ditutup untuk pelayanan.

Solusi yang dilakukan adalah menyediakan lahan pasar untuk penampungan sampah sementara ketika TPA Piyungan tutup pelayanan.

b. Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya

Kegiatan ini merupakan kegiatan di Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Tradisional untuk pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan serta pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan.

Anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp.619.815.353,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.592.899.496,00, dengan capaian sebesar 95,6%.

Indikator Kinerja kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya adalah: pembinaan pedagang pasar: 5 UPTD pelayanan pasar, dengan capaian 100%.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, permasalahan yang dihadapi adalah keterbatasan jumlah personil sementara pada tahun 2022 banyak agenda yang diluar rutinitas kegiatan.

Solusi yang dilakukan adalah pelibatan personil tidak hanya pada yang mampu kegiatan, dan pengaturan jadwal yang efektif.

i. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

Sub Kegiatan ini merupakan kegiatan yang berupa penataan PKL pendataan pedagang, tempat dagangan, monitoring, penertiban ijin PKL reklamasi lahan relokasi dan sewa lahan untuk relokasi.

Anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp.401.951.873,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.375.184.757,00, dengan capaian sebesar 93,3%. Rendahnya serapan keuangan dikarenakan adanya efisiensi anggaran dari belanja sewa bangunan kantor dimana nilai appraisal di bawah pagu anggaran, dan adanya selisih harga kontrak dengan pagu anggaran pada pengadaan alat angkutan darat bermotor .

Indikator, target dan realisasi keluaran Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.12. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

No	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Penataan PKL	Lokasi di luar pasar	2	2	100%
2	Penataan PKL	Pasar	2	2	100%
3	Pendataan pedagang, tempat dagangan, dan monitoring	Pasar	2	3	150%
4	Penerbitan Ijin PKL	Ijin	200	203	101,50%
5	Reklamasi lahan relokasi	Lokasi	1	1	100%
6	Sewa Lahan Pasar Untuk Relokasi	Lokasi	1	1	100%

Permasalahan yang dihadapi Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan adalah keterbatasan jumlah personil sementara pada tahun 2022 banyak agenda yang diluar rutinitas kegiatan.

Solusi yang dilakukan adalah pelibatan personil tidak hanya pada yang mengampu kegiatan, dan pengaturan jadwal yang efektif.

- ii. Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
Sub Kegiatan ini merupakan kegiatan yang berupa pemantauan bantuan modal pedagang pasar, pembinaan organisasi paguyuban PKL, pembinaan pedagang pasar, pendampingan pengelola administrasi penguatan modal, dan pengembangan potensi paguyuban pedagang pasar

Anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp.217.863.480,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.217.714.739,00, dengan capaian sebesar 99,9%.

Indikator, target dan realisasi keluaran Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.13. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan
Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

No	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Pemantauan Bantuan Modal Pedagang Pasar	Kel pedag	100	110	110%
2	Pembinaan Organisasi paguyuban PKL	Angkatan	2	2	100%
3	Pembinaan Pedagang Pasar	UPTD Pelayanan pasar	3	3	100%
4	Pendampingan Pengelolaan Administrasi Penguatan Modal	Kel pedagang	10	18	180%

No	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
5	Pengembangan Potensi Paguyuban Pedagang Pasar	Paguyuban	3	3	100%

Permasalahan yang dihadapi Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan adalah Keterbatasan personil bidang sehingga harus ikut membantu ketugasan kelompok substansi yang lain

Solusi yang dilakukan adalah Koordinasi yang intensif di tingkat bidang dan penyusunan jadwal secara efektif.

4. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Program ini merupakan program pendukung di Bidang Usaha Perdagangan, yang terdiri atas satu kegiatan.

Pada tahun 2022 program ini dianggarkan sebesar Rp.895.210.946,00, dan dapat direalisasikan sebesar Rp.890.633.838,00, atau dapat dikatakan tercapai 99,5%. Target indikator kinerja Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting berupa persentase kecukupan stock barang kebutuhan pokok daerah: 75% dapat direalisasikan 100% dengan capaian kinerja 133,33%

Dalam melaksanakan program tersebut ditemukan beberapa permasalahan berupa ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok daerah sangat dipengaruhi ketersediaan barang secara nasional, kemudahan distribusi, dan beberapa komoditas yang berupa komoditas pertanian sangat dipengaruhi oleh musim dan cuaca.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah melakukan upaya-upaya solusi sebagai berikut:

- koordinasi intensif Tim Pengendali Inflasi Daerah tidak hanya di tingkat Kabupaten tetapi juga di tingkat Provinsi
- melakukan operasi pasar disaat terjadi kenaikan harga komoditas barang kebutuhan pokok yang cukup signifikan.

a. Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang berada di Bidang Usaha Perdagangan untuk monitoring barang rusak dan kadaluwarsa, monitoring gas bersubsidi, monitoring barang kebutuhan pokok dan barang penting, serta pemetaan rantai distribusi barang kebutuhan pokok.

Anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp.895.210.946,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.890.633.838,00, dengan capaian sebesar 99,5%.

Indikator Kinerja kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota adalah: Laporan monitoring harga barang kebutuhan pokok dan barang penting: 12 dokumen, dapat tercapai 100%

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, permasalahan yang dihadapi adalah ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok daerah sangat dipengaruhi ketersediaan barang secara nasional, kemudahan distribusi, dan beberapa komoditas yang berupa komoditas pertanian sangat dipengaruhi oleh musim dan cuaca.

Solusi yang dilakukan adalah koordinasi intensif Tim Pengendali Inflasi Daerah tidak hanya di tingkat Kabupaten tetapi juga di tingkat Provinsi dan melakukan operasi pasar disaat terjadi kenaikan harga komoditas barang kebutuhan pokok yang cukup signifikan

i. Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan ini merupakan kegiatan yang berupa monitoring barang rusak dan kadaluwarsa, serta monitoring gas bersubsidi.

Anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp.39.080.013,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.39.044.438,00, dengan capaian sebesar 99,9%.

Indikator, target dan realisasi keluaran Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.14. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

No	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Monitoring barang rusak dan kadaluarsa	Toko	30	30	100%
2	Monitoring gas bersubsidi	Kecamatan	17	17	100%

Permasalahan yang dihadapi Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota adalah di lapangan meskipun pemahaman pedagang sudah meningkat namun masih ditemui barang kadaluarsa yang belum disingkirkan dari display. Dari sekitar 10 toko masih ditemui 1 toko yang seperti ini. Sedangkan terkait dengan gas, permasalahan yang dihadapi pada pelaku usaha adalah Harga Eceran Tertinggi (HET) tidak seimbang dengan biaya operasional. HET yang ada sekarang adalah penetapan tahun 2015.

Solusi yang dilakukan adalah lebih sosialisasi terus menerus tentang barang kadaluarsa di saat monitoring dan untuk permasalahan gas, akan diajukan usulan kenaikan HET..

- ii. Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan

Sub Kegiatan ini merupakan kegiatan yang berupa monitoring harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, serta pemetaan rantai distribusi barang kebutuhan pokok

Anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp.845.426.033,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.840.884.500,00, dengan capaian sebesar 99,5%.

Indikator, target dan realisasi keluaran Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.15. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan

No	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Laporan monitoring harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Dokumen	12	12	100%
2	Pemetaan rantai distribusi barang kebutuhan pokok	Dokumen	1	1	100%

Permasalahan yang dihadapi Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan adalah ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok daerah sangat dipengaruhi ketersediaan barang secara nasional, kemudahan distribusi, dan beberapa komoditas yang berupa komoditas pertanian sangat dipengaruhi oleh musim dan cuaca.

Solusi yang dilakukan adalah koordinasi intensif Tim Pengendali Inflasi Daerah tidak hanya di tingkat Kabupaten tetapi juga di tingkat Provinsi dan melakukan operasi pasar disaat terjadi kenaikan harga komoditas barang kebutuhan pokok yang cukup signifikan.

5. Program Pengembangan Ekspor

Program ini merupakan program pendukung di Bidang Usaha Perdagangan, yang terdiri atas satu kegiatan.

Pada tahun 2022 program ini dianggarkan sebesar Rp.559.224.433,00, dan dapat direalisasikan sebesar Rp.558.538.035,00, atau dapat dikatakan tercapai 99,9%. Target indikator kinerja Program Pengembangan Ekspor berupa Persentase jumlah pelaku usaha berorientasi ekspor: 18% dapat direalisasikan 28,44% dengan capaian kinerja 158%

Dalam melaksanakan program tersebut ditemukan beberapa permasalahan, berupa:

- ketergantungan yang tinggi kepada Provinsi selaku pemilik sumber data ekspor-impor Daerah Istimewa Yogyakarta.
- belum semua IKM peserta pameran yang difasilitasi mempunyai kemampuan bernegosiasi dengan calon buyer.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah melakukan upaya-upaya solusi sebagai berikut:

- koordinasi intensif dengan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- melakukan pendampingan dalam rangka meningkatkan kemampuan IKM peserta bernegosiasi dengan calon buyer.

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang berada di Bidang Usaha Perdagangan untuk pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan, pameran dagang nasional, peningkatan citra produk ekspor, dan pembinaan pelaku usaha ekspor.

Anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp.559.224.433,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.558.538.035,00, dengan capaian sebesar 99,9%.

Indikator Kinerja kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang

terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota adalah: Laporan realisasi ekspor impor: 1 dokumen, dapat tercapai 100%

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, permasalahan yang dihadapi adalah:

- ketergantungan yang tinggi kepada Provinsi selaku pemilik sumber data ekspor-impor Daerah Istimewa Yogyakarta.
- belum semua IKM peserta pameran yang difasilitasi mempunyai kemampuan bernegosiasi dengan calon buyer.

Solusi yang dilakukan adalah:

- koordinasi intensif dengan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- melakukan pendampingan dalam rangka meningkatkan kemampuan IKM peserta bernegosiasi dengan calon buyer.

i. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan ini merupakan sub kegiatan untuk penyusunan laporan ekspor impor Kabupaten Sleman.

Anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp.13.254.600,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.13.136.000,00, dengan capaian sebesar 99,1%.

Indikator, dan target keluaran Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota adalah laporan realisasi ekspor impor: 1 dokumen. Indikator tersebut dapat tercapai 100%.

Permasalahan yang dihadapi Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota adalah ketergantungan yang tinggi kepada Provinsi selaku pemilik sumber data ekspor-impor Daerah Istimewa Yogyakarta.

Solusi yang dilakukan adalah koordinasi intensif dengan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

ii. Sub Kegiatan Pameran Dagang Nasional

Sub Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk membiayai keikutsertaan dalam IFEX dan penyelenggaraan pameran virtual.

Anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp.328.851.750,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.328.543.180,00, dengan capaian sebesar 99,9%.

Indikator, target dan realisasi keluaran Sub Kegiatan Pameran Dagang Nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 2.16. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Pameran Dagang Nasional

No	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Keikutsertaan dalam IFEX 2022	Kali	1	1	100%
2	Pameran virtual	Kali	1	1	100%

Permasalahan yang dihadapi Sub Kegiatan Pameran Dagang Nasional adalah belum semua IKM peserta pameran yang difasilitasi mempunyai kemampuan bernegosiasi dengan calon buyer.

Solusi yang dilakukan adalah melakukan pendampingan dalam rangka meningkatkan kemampuan IKM peserta bernegosiasi dengan calon buyer.

iii. Sub Kegiatan Peningkatan Citra Produk Ekspor

Sub Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk membiayai temu bisnis dan virtual business matching.

Anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp.142.493.275,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.142.258.630,00, dengan capaian sebesar 99,8%.

Indikator, target dan realisasi keluaran Sub Kegiatan Peningkatan Citra Produk Ekspor adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.17. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan
Peningkatan Citra Produk Ekspor**

No	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Temu Bisnis	Orang	35	85	242,9%
2	Virtual Business Matching	Kali	1	1	100%

Permasalahan yang dihadapi Sub Kegiatan Peningkatan Citra Produk Ekspor adalah belum semua IKM peserta pameran yang difasilitasi mempunyai kemampuan bernegosiasi dengan calon buyer.

Solusi yang dilakukan adalah melakukan pendampingan dalam rangka meningkatkan kemampuan IKM peserta bernegosiasi dengan calon buyer

iv. Sub Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor

Sub Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk membiayai fasilitasi paguyuban eksportir dan pendampingan pengembangan ekspor.

Anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp.74.624.808,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.74.600.225,00, dengan capaian sebesar 99,9%.

Indikator, target dan realisasi keluaran Sub Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.18. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan
Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor**

No	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Fasilitasi paguyuban eksportir	Paguyuban	1	1	100%
2	Pendampingan pengembangan ekspor	IKM	6	6	100%

Permasalahan yang dihadapi Sub Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor adalah

- Sesuai hasil evaluasi peserta tahun sebelumnya, banyak diusulkan berbagai materi yang dibutuhkan, sehingga pada tahun berjalan materinya terlalu banyak yang menimbulkan pelaksanaan pelatihan sampai sore.
- Peserta pelatihan baru mulai memahami satu materi sudah berganti materi yang lain, sehingga kurang tuntas dan kurang "nyantel" materinya

Solusi yang dilakukan adalah untuk tahun berikutnya tidak akan disampaikan terlalu banyak materi tetapi akan dipilih materi yang betul-betul diperlukan, sehingga para peserta lebih memahami.

6. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Program ini merupakan program pendukung di Bidang Usaha Perdagangan, dan Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Tradisional yang terdiri atas satu kegiatan dan tiga sub kegiatan.

Pada tahun 2022 program ini dianggarkan sebesar Rp.2.175.393.428,00, dan dapat direalisasikan sebesar Rp.2.153.826.649,00, atau dapat dikatakan tercapai 99%. Indikator, target dan realisasi kinerja Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

Tabel 2.19. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Persentase peningkatan kunjungan ke pasar kabupaten	%	2	5	250%
2	Jumlah pelaku UMKM yang bermitra dengan pelaku usaha ritel modern	UMKM	36	36	100%

Dalam melaksanakan program tersebut ditemukan beberapa permasalahan berupa:

- belum semua IKM peserta yang mendapatkan fasilitasi pameran tertib mengikuti aturan main yang sudah ditetapkan
- masih rendahnya minat pedagang pasar untuk digitalisasi pasar
- masih diperlukan program-program promosi pasar, namun terkendala oleh ketersediaan anggaran

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah melakukan upaya-upaya solusi sebagai berikut:

- evaluasi atas penyelenggaraan pameran dan menyepakati ulang aturan main bersama dengan IKM peserta.
- Sosialisasi terus menerus terkait digitalisasi pasar kepada pedagang
- Kolaborasi dengan BUMN dan BUMD melalui program CSR untuk mendukung promosi pasar

a. Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang berada di Bidang Usaha Perdagangan dan Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Tradisional untuk Pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan peningkatan sistem dan Jaringan informasi perdagangan

Anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp.2.175.393.428,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.2.153.826.649,00, dengan capaian sebesar 99%.

Indikator Kinerja kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri adalah: Pelaksanaan promosi melalui pameran produk skala lokal/nasional: 4 event, dapat direalisasikan 5 event atau tercapai 125%

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, permasalahan yang dihadapi adalah:

- Keterbatasan anggaran untuk melaksanakan promosi pasar
- Pengelolaan radio pasar kurang efektif, hanya beroperasi di 3 pasar (Pasar Cebongan, Pasar Sleman Unit I, Pasar Sleman Unit II)
- Kurangnya minat pedagang untuk menerapkan digitalisasi pasar

Solusi yang dilakukan adalah

- Kolaborasi dengan BUMN dan BUMD melalui program CSR untuk mendukung promosi pasar
- Sentralisasi radio pasar
- Sosialisasi terus menerus terkait digitalisasi pasar kepada pedagang

i. Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan ini merupakan sub kegiatan untuk menyusun kajian pengembangan pasar, kajian roadmap pasar rakyat dan pengelolaan radio pasar

Anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp.362.898.067,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.361.749.480,00, dengan capaian sebesar 99,7%.

Indikator, dan target keluaran Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

Tabel 2.20. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

No	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Kajian Pengembangan Pasar	Dokumen	1	1	100%
2	Kajian Roadmap Pasar Rakyat	Dokumen	1	1	100%
3	Pengelolaan radio pasar	Pasar	3	3	100%

Permasalahan yang dihadapi Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota adalah:

- Keterbatasan anggaran untuk melaksanakan promosi pasar
- Pengelolaan radio pasar kurang efektif, hanya beroperasi di 3 pasar (Pasar Cebongan, Pasar Sleman Unit I, Pasar Sleman Unit II)
- Kurangnya minat pedagang untuk menerapkan digitalisasi pasar

Solusi yang dilakukan adalah

- Kolaborasi dengan BUMN dan BUMD melalui program CSR untuk mendukung promosi pasar
- Sentralisasi radio pasar

ii. Sub Kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk membiayai keikutsertaan dalam pameran pameran skala lokal/nasional dan penyelenggaraan pameran tetap di Galeri Upakarti dan Showroom Gedung Dekranasda.

Anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp.968.678.431,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.962.322.014,00, dengan capaian sebesar 99,3%.

Indikator, target dan realisasi keluaran Sub Kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

Tabel 2.21. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

No	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Bazar UMKM dalam pelaksanaan PORDA XVI dan PEPARDA III	Kali	1	1	100%
2	Pameran di Gedung Dekranas	Kali	1	1	100%
3	Penyelenggaraan Pameran HUT Dekranas	Kali	1	1	100%
4	Promosi tetap produk IKM di Galeri Upakarti Sleman	IKM	150	214	142,67%
5	Promosi tetap produk IKM di Showroom Dekranasda	IKM	100	110	110%

Permasalahan yang dihadapi Sub Kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota adalah belum semua IKM peserta yang mendapatkan fasilitasi pameran tertib mengikuti aturan main yang sudah ditetapkan.

Solusi yang dilakukan adalah dilakukan evaluasi atas penyelenggaraan pameran dan menyepakati ulang aturan main bersama dengan IKM peserta.

- iii. Sub Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan
Sub Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk membiayai Pelatihan pemasaran online dan temu usaha, pembinaan usaha dagang, pembinaan usaha ritel lokal, dan penyusunan naskah akademik Raperda Gudang..

Anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp.843.816.930,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.829.755.155,00, dengan capaian sebesar 98,3%.

Indikator, target dan realisasi keluaran Sub Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.22. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan

No	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Fasilitasi Pemasaran Online (Kalurahan Sidoagung)	Orang	20	20	100%
2	Naskah Akademik Raperda Gudang	Dokumen	1	1	100%
3	Pelatihan Pemasaran Online dan temu usaha perdagangan mikro, kecil dan warga Miskin (Kalurahan Jogotirto)	Orang	20	20	100%
4	Pelatihan Pemasaran Online dan temu usaha perdagangan mikro, kecil dan warga Miskin (Kalurahan Margoagung)	Orang	20	20	100%

No	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
5	Pelatihan Pemasaran Online dan temu usaha perdagangan mikro, kecil dan warga Miskin (Kalurahan Sindumartani)Orang	Orang	20	20	100%
6	Pelatihan Pemasaran Online dan temu usaha perdagangan mikro, kecil dan warga Miskin (Kalurahan Wedomartani)	Orang	20	20	100%
7	Pelatihan pemasaran online dan temu usaha perdagangan mikro, kecil dan warga miskin (Sendangsari, Hargobinangun, Sinduadi, Somodaran-Purwomartani, Sentono-Pelatihan pemasaran online dan temu usaha perdagangan mikro, kecil dan warga miskin (Sendangsari, Hargobinangun, Sinduadi, Somodaran-Purwomartani, Sentono-Tamanmartani, Celungan-Sumberagung, Nogosari-Sidokarto, Tlogoadi)	Angkatan	8	8	100%
8	Pembinaan Usaha Dagang (Kaliwanglu, Harjobinangun; Condongcatur)	Angkatan	2	2	100%
9	Pembinaan Usaha Ritel Lokal (Tridadi, Pendowoharjo, dan Berbah)	Angkatan	3	3	100%
10	Temu usaha (Kapanewon Pakem)	Orang	20	20	100%

Permasalahan yang dihadapi Sub Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan adalahseringkali pihak pengusul belum siap dengan peserta yang sesuai kriteria.

Solusi yang dilakukan adalah :

- Persiapan perekrutan peserta dilakukan lebih awal, apabila memungkinkan dilakukan seleksi / kurasi calon peserta pembinaan.
- Perlu dilakukan peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan kegiatan bersama dengan semua pihak yang terkait.
- Panitia penyelenggara/Kelompok Subtansi pengembangan Usaha melakukan penjangkaran peserta secara langsung.
- Peserta dihimbau mengajak teman/tetangganya yang memiliki usaha sejenis untuk mengikuti kegiatan pembinaan / pengembangan usaha sehingga capaian peserta 100%.

7. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Program ini merupakan program pendukung di UPTD Pelayanan Metrologi Legal yang terdiri atas satu kegiatan dan satu sub kegiatan.

Pada tahun 2022 program ini dianggarkan sebesar Rp.545.819.963,00, dan dapat direalisasikan sebesar Rp.545.257.783,00, atau dapat dikatakan tercapai 99,9%. Indikator, dan target kinerja Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen adalah Persentase UTTP yang bertanda Tera Sah: 19%, dapat direalisasikan sebesar 32,36% atau tercapai 170,3%

Dalam melaksanakan program tersebut ditemukan beberapa permasalahan berupa masih adanya potensi tera/tera ulang di pasar yang belum bisa dilayani karena keterbatasan anggaran, dimana sebelum sidang biasanya didahului dengan sosialisasi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah melakukan upaya-upaya solusi berupa pelaksanaan tera/tera ulang sesuai prioritas, mengusulkan di penganggaran tahun berikutnya, edukasi sambal memberikan sosialisasi lisan kepada pelaku usaha secara door to door.

a. Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang berada di UPTD Pelayanan Metrologi Legal untuk pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang

Anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp.545.819.963,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.545.257.783,00, dengan capaian sebesar 99,9%.

Indikator Kinerja kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan adalah: pelayanan tera/tera ulang: 12 bulan, dapat tercapai 100%.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, permasalahan yang dihadapi adalah masih adanya potensi tera/tera ulang di pasar yang belum bisa dilayani karena keterbatasan anggaran, dimana sebelum sidang biasanya didahului dengan sosialisasi.

Solusi yang dilakukan adalah pelaksanaan tera/tera ulang sesuai prioritas, mengusulkan di penganggaran tahun berikutnya, edukasi sambil memberikan sosialisasi lisan kepada pelaku usaha secara door to door.

- i. Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
Sub Kegiatan ini merupakan sub kegiatan untuk pelayanan tera/tera ulang dan untuk sosialisasi pelayanan tera/tera ulang

Anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp.545.819.963,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.545.257.783,00, dengan capaian sebesar 99,9%.

Indikator, target dan realisasi keluaran Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.23. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang

No	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Pelayanan Tera/Tera Ulang	Bulan	12	12	100%
2	peserta sosialisasi pelayanan tera/tera ulang	Orang	1.000	1.288	128,8%

Permasalahan yang dihadapi Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang adalah: masih adanya potensi tera/tera ulang di

pasar yang belum bisa dilayani karena keterbatasan anggaran, dimana sebelum sidang biasanya didahului dengan sosialisasi.

Solusi yang dilakukan adalah pelaksanaan tera/tera ulang sesuai prioritas, mengusulkan di penganggaran tahun berikutnya, edukasi sambil memberikan sosialisasi lisan kepada pelaku usaha secara door to door.

B. URUSAN PERINDUSTRIAN

Pada urusan perindustrian, sesuai dengan Peraturan daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengampu indikator kinerja daerah berupa: persentase pertumbuhan nilai produksi industri

Target, realisasi dan capaian indikator kinerja daerah tersebut pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.24. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Perindustrian Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya produksi sektor industri dan perdagangan	persentase pertumbuhan nilai produksi industri	2,1%	2,2%	104,8%

Sedangkan capaian indikator kinerja urusan perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.25. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Renstra Urusan Perindustrian
Tahun 2022

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1	Tujuan: Memantapkan daya saing sektor industri	Persentase pertumbuhan nilai produksi industri	2,1	2,2	104,8
2	Sasaran: Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi industri	Persentase pelaku usaha perdagangan yang memiliki izin usaha	2,1	2,2	104,8

Dapat dilihat bahwa, indikator kinerja daerah urusan perindustrian yang menjadi ampuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta indikator Renstra dapat tercapai lebih dari 100%.

Sedangkan capaian perkembangan penyelenggaraan urusan perindustrian adalah sebagai berikut:

Tabel 2.26. Perkembangan Penyelenggaraan Urusan Perindustrian Tahun 2018-2022

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah usaha industri	16.945	17.016	11.362	11.445	11.571
2	Pertumbuhan industri (%)	0,28	0,42	-3,4	2,1	2,2
3	Jumlah industri kecil dan rumah tangga (unit)	16.770	16.898	11.153	11.233	11.353

Dalam melaksanakan urusan perindustrian ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- Belum optimalnya pengembangan desain dan kualitas produk.
- Masih sangat dibutuhkannya peningkatan kapasitas produksi dan perluasan pangsa pasar.
- Belum terpenuhinya standarisasi dan pemenuhan syarat perijinan usaha industri.
- Masih terbatasnya digitalisasi pelaku usaha industri.
- Kurangnya Permodalan untuk pengembangan usaha industri.
- Masih belum optimalnya pengembangan usaha pelaku usaha industri.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah melakukan upaya-upaya solusi sebagai berikut:

- Pelaksanaan bimbingan teknis pengembangan desain dan kualitas produk melalui kegiatan Bidang Perindustrian baik melalui kegiatan kajian untuk menyediakan bahan pengambilan keputusan pengembangan produk local maupun melalui kegiatan-kegiatan bimbingan teknis terkait melalui dukungan PUPM, POKIR, dan lainnya
- Fasilitasi promosi dan pemasaran melalui penyelenggaraan maupun partisipasi pada pameran-pameran local sampai dengan skala nasional melalui kegiatan-kegiatan Bidang Usaha Perdagangan
- Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian industri melalui kegiatan pengawasan industri yang memantau kepatuhan pelaku usaha industri terhadap peraturan perundangan yang berlaku
- pelaksanaan penguatan digitalisasi pelaku industri melalui pelayanan Rumah Kreatif Sleman Bidang Perindustrianserta melalui kegiatan Bidang Usaha Perdagangan
- Penguatan permodalan melalui pelaksanaan verifikasi pemohon dana penguatan modal industri
- pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis/workshop pengembangan usaha bagi pelaku usaha industri tingkat lanjut
- dilakukan pola pola kemitraan dengan industri lain yang sudah mapan.

Program-program pada urusan perindustrian yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut:

1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Program ini merupakan program pada bidang Perindustrian yang terdiri dari satu kegiatan dan 3 sub kegiatan.

Pada tahun 2022 program ini dianggarkan sebesar Rp.9.898.002.047,00, dan dapat direalisasikan sebesar Rp.8.964.707.310,70, atau dapat dikatakan tercapai 90,06%. Rendahnya serapan anggaran ini dikarenakan adanya efisiensi yang dihasilkan dari selisih pagu dengan nilai kontrak pembangunan Rumah Promosi dan Wisata Edukasi Sentra Jadah Tempe Kaliurang. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program adalah persentase sentra industri aktif: 82%, dan dapat tercapai 100%.

Dalam melaksanakan program tersebut ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- Ketidak siapan kalurahan/kapanewon dalam menentukan peserta Bimtek, seringkali peserta tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pada kamus PUPM
- Pembinaan bimbingan teknis yang dilakukan hanya sebatas transfer ilmu dan ketrampilan dari instruktur kepada peserta bimtek. Untuk menunjang keberlangsungan paska pelaksanaan bimtek dibutuhkan alat-alat untuk menunjang produksi
- Jumlah pelaksanaan bimtek pada tahun 2022 yang cukup banyak menjadikan jadwal pelaksanaan harus direncanakan dengan matang dan *rigid* sehingga seminimal mungkin tidak terjadi pergeseran jadwal pelaksanaan yang menyebabkan pelaksanaan bimtek secara keseluruhan akan menjadi terganggu
- Pelaksanaan tender tidak sesuai dengan target semula karena adanya penggabungan dua jenis rekening kedalam satu rekening, yaitu pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang hal ini berimbas pada usulan revisi DPA ke BKAD.
- Kontrak pekerjaan konstruksi terdapat 4 (empat) aktivitas yaitu pematangan lahan awal, pembangunan/revitalisasi sarana terpadu sentra IKM, pembangunan/revitalisasi infrastruktur penunjang di dalam sentra IKM dan pengadaan mesin dan peralatan keempatnya bisa ditenderkan secara mandiri, akan tetapi karena keterbatasan waktu dan untuk efektivitas pelaksanaan tender

pada pelaksanaannya hanya terdapat satu kontrak dan masing-masing pekerjaan tidak diizinkan lintas nilai dan volume.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah melakukan upaya-upaya solusi sebagai berikut:

- Koordinasi lebih intensif dan lebih awal dengan kalurahan/kapanewon dalam menentukan peserta Bimtek agar proses rekrutmen bisa optimal
- Mengarahkan kepada peserta pelatihan untuk mengajukan bantuan peralatan produksi melalui jalur BKK (Bantuan Keuangan Khusus)
- Mengkomunikasikan jadwal pelaksanaan bimtek kepada *stakeholder* terkait (Anggota DPRD, Kapanewon, Kalurahan, instruktur bimtek) minimal satu bulan sebelum pelaksanaan bimtek sehingga ada waktu yang cukup longgar untuk koordinasi demi kelancaran pelaksanaan bimtek
- Berkomunikasi ke BKAD secara intensif untuk memprioritaskan revisi DPA bisa dipercepat
- Konsultasi ke Kementerian Perindustrian, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, BKAD Kab. Sleman

a. Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

Kegiatan ini terdiri atas tiga sub kegiatan yang masing-masing dilaksanakan oleh kelompok substansi di Bidang Perindustrian

Anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp.9.898.002.047,00, dan dapat direalisasikan sebesar Rp.8.964.707.310,70, atau dapat dikatakan tercapai 90,06%.

Indikator Kinerja kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota adalah peserta pendampingan kelompok/sentra industri: 1 sentra dapat direalisasikan 4 sentra/kelompok sehingga tercapai kinerja 400%.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, permasalahan yang sering dihadapi adalah :

- Ketidak siapan kalurahan/kapanewon dalam menentukan peserta Bimtek, seringkali peserta tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pada kamus PUPM

- Pembinaan bimbingan teknis yang dilakukan hanya sebatas transfer ilmu dan ketrampilan dari instruktur kepada peserta bimtek. Untuk menunjang keberlangsungan paska pelaksanaan bimtek dibutuhkan alat-alat untuk menunjang produksi
- Jumlah pelaksanaan bimtek pada tahun 2022 yang cukup banyak menjadikan jadwal pelaksanaan harus direncanakan dengan matang dan *rigid* sehingga seminimal mungkin tidak terjadi pergeseran jadwal pelaksanaan yang menyebabkan pelaksanaan bimtek secara keseluruhan akan menjadi terganggu

Solusi yang dilakukan adalah

- Koordinasi lebih intensif dan lebih awal dengan kalurahan/kapanewon dalam menentukan peserta Bimtek agar proses rekrutmen bisa optimal
- Mengarahkan kepada peserta pelatihan untuk mengajukan bantuan peralatan produksi melalui jalur BKK (Bantuan Keuangan Khusus)
- Mengkomunikasikan jadwal pelaksanaan bimtek kepada *stakeholder* terkait (Anggota DPRD, Kapanewon, Kalurahan, instruktur bimtek) minimal satu bulan sebelum pelaksanaan bimtek sehingga ada waktu yang cukup longgar untuk koordinasi demi kelancaran pelaksanaan bimtek

- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri.

Sub Kegiatan ini digunakan untuk pendampingan kelompok/sentra industri dan pengukuham sentra industri dengan SK Bupati

Anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp.135.909.420,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.135.035.750,00, dengan capaian sebesar 99,4%.

Indikator, target dan realisasi keluaran Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri adalah sebagai berikut:

Tabel 2.27. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri

No	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Pendampingan Kelompok industri (PUPM Kapanewon Sleman)	Kelompok	2	2	100%
2	Pendampingan Kelompok Sentra Industri (PUPM Kalurahan Pondokrejo)	Orang	20	20	100%
3	Pendampingan kelompok/sentra industri (PUPM Kalurahan Sidoagung)	Orang	15	15	100%
4	Sentra yang dikukuhkan berdasarkan SK Bupati	Sentra	5	5	100%

Permasalahan yang dihadapi pada sub kegiatan ini adalah dalam menentukan nilai skor pada masing-masing sentra industri kecil yang akan dikukuhkan karena subyektivitas dan kurangnya informasi yang komprehensif kepada tim penilai sehingga dapat menimbulkan perbedaan pemahaman.

Solusi yang telah dilakukan berupa menyelenggarakan ruang diskusi bersama antara tim penilai dan tim peninjau lapangan calon sentra industri kecil yang akan dikukuhkan

- ii. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri.

Sub Kegiatan ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan bimtek manajemen usaha industri, pelayanan Rumah Kreatif Sleman, verifikasi pemohon dana penguatan modal sektor industri, pemantauan penerima dana penguatan sektor industri, dan penyelenggaraan Rakerda Dekranasda

Anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp.536.628.891,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.517.044.976,00, dengan capaian sebesar 96,4%.

Indikator, target dan realisasi keluaran Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri adalah sebagai berikut:

Tabel 2.28. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri

No	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Bimtek manajemen usaha industri (PUPM)	Orang	20	20	100%
2	Pelayanan Rumah Kreatif Sleman	Bulan	12	12	100%
3	Pemohon dana penguatan modal sektor industri yang diverifikasi	Pemohon	10	10	100%
4	Penerima dana penguatan modal industri yang dipantau (dimonitor dan dievaluasi)	IKM	40	40	100%
5	Peserta Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Dekranasda	Orang	150	150	100%

Permasalahan yang dihadapi pada sub kegiatan ini adalah:

- Peserta bimbingan teknis kegiatan Pagu Usulan Partisipasi Masyarakat (PUPM) yang belum sesuai kriteria (bukan pelaku usaha industri)
- Dengan adanya Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terjadi perubahan kriteria pelaku usaha mikro yang mempengaruhi penentuan sasaran verifikasi permohonan Dana Penguatan Modal (DPM) industri. Kejelasan sasaran dibutuhkan agar tidak terjadi tumpang tindih dengan verifikasi

pemohon DPM dari skala usaha mikro oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman.

- Antusiasme pelaku usaha mikro berbagai sektor yang ingin mengakses pelayanan Rumah Kreatif Sleman yang besar sehingga pemberian pelayanan cukup kewalahan.
- Pelaksanaan Rakerda serta kegiatan-kegiatan Dekranasda Kabupaten Sleman yang terkait dengan kegiatan-kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya mempengaruhi ketepatan pelaksanaan kegiatan;
- Terbatasnya dukungan APBD dalam penyelenggaraan kegiatan pembinaan IKM melalui Dekranasda Kabupaten Sleman maupun Rumah Kreatif Sleman;
- Lambatnya penyelesaian administrasi kegiatan karena terbatasnya perangkat computer yang handal bagi pelaksana

Solusi yang telah dilakukan berupa:

- Evaluasi dilaksanakan dan menjadi masukan yang disampaikan ke Kapanewon agar proses rekrutmen peserta lebih optimal
- Koordinasi dengan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman dan penyelesaian Berita Acara Kesepakatan Penetapan Skala Usaha Pelaku Industri Skala Usaha Mikro dan Kecil sebagai Calon Penerima Dana Penguatan Modal (DPM) wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2022 Nomor 570/399.a tanggal 25 Maret 2022 yang menetapkan:
 - o kriteria pemohon DPM di Bidang Perindustrian yang diverifikasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman adalah pelaku usaha industri skala usaha mikro sesuai Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021;
 - o kriteria pemohon DPM di Bidang Perindustrian yang diverifikasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman adalah pelaku usaha industri skala usaha kecil sesuai Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021;
- Penetapan kriteria peserta pada saat rekrutmen peserta dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan Rumah Kreatif Sleman sehingga

kemampuan pelayanan tetap ideal dan menghasilkan kualitas pelayanan yang lebih optimal;

- Koordinasi intensif lintas sektor yang didukung kebijakan pimpinan agar kegiatan tetap dapat terlaksana sesuai jadwal yang masih dalam batas toleransi;
- Koordinasi untuk mendapatkan dukungan berbagai mitra terkait dukungan anggaran serta dukungan lainnya dalam pelaksanaan kegiatan;
- Pengajuan pengadaan perangkat sesuai kebutuhan dan penggunaan perangkat yang ada semaksimal mungkin

iii. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

Tahun 2022 pada Sub Kegiatan ini juga terdapat Dana Alokasi Khusus yang digunakan untuk Pembangunan Rumah Promosi dan Wisata Edukasi Sentra Jadah Tempe Kaliurang beserta pelatihan pelatihan pendukung, dan dana APBD untuk melaksanakan Bimtek-Bimtek produksi.

Anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp.9.225.463.736,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.8.312.626.584,70, dengan capaian sebesar 90,1%. Rendahnya serapan anggaran ini dikarenakan adanya efisiensi yang dihasilkan dari selisih pagu dengan nilai kontrak pembangunan Rumah Promosi dan Wisata Edukasi Sentra Jadah Tempe Kaliurang

Indikator, target dan realisasi keluaran Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 2.29. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

No	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas	Dokumen	1	1	100%
2	Dokumen Lingkungan Hidup	Dokumen	1	1	100%
3	Kajian Substitusi Impor	Dokumen	1	1	100%
4	Pembangunan Rumah Promosi dan Wisata Edukasi Sentra Jadah Tempe	Paket	1	1	100%
5	Peserta Bimtek Bambu Laminasi di Dondong RT 05 RW 21 Tegaltirto Berbah	Orang	20	20	100%
6	Peserta Bimtek Bambu Laminasi di Dondong RT 06 RW 21 Tegaltirto Berbah	Orang	20	20	100%
7	Peserta Bimtek Bambu Laminasi di Jragung, Jogotito	Orang	20	20	100%
8	Peserta Bimtek Bambu Laminasi di Sardonoarjo	Orang	20	20	100%
9	Peserta Bimtek Bambu Laminasi di Sendangmulyo	Orang	20	20	100%
10	Peserta Bimtek Bambu Laminasi di Tegaltirto, Berbah	Orang	20	20	100%
11	Peserta Bimtek Batik di Bulu, Jogotito	Orang	20	20	100%
12	Peserta Bimtek Batik di Cageran, Tamanmartani	Orang	20	20	100%
13	Peserta Bimtek Batik di Denokan, Maguwoharjo	Orang	20	20	100%
14	Peserta Bimtek Batik di Donoharjo, Ngaglik	Orang	20	20	100%
15	Peserta Bimtek Batik di Gadingan, Sumberrejo	Orang	20	20	100%
16	Peserta Bimtek Batik di Jongkangan,	Orang	20	20	100%

No	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Tamanmartani				
17	Peserta Bimtek Batik di Sardonoarjo	Orang	20	20	100%
18	Peserta Bimtek Batik Karang Taruna Kalurahan Trihanggo	Orang	20	20	100%
19	Peserta Bimtek Batik Kelompok Mekar Lestari Kalurahan Trihanggo	Orang	20	20	100%
20	Peserta Bimtek Batik Lanjutan di Condongcatur	Orang	20	20	100%
21	Peserta Bimtek Batik Lanjutan di Gayamharjo	Orang	20	20	100%
22	Peserta Bimtek Batik Lanjutan di Kepuharjo	Orang	20	20	100%
23	Peserta Bimtek Batik Lanjutan di Margodadi	Orang	20	20	100%
24	Peserta Bimtek Batik Lanjutan di Merdikorejo	Orang	20	20	100%
25	Peserta Bimtek Batik Lanjutan di Purwobinangun	Orang	20	20	100%
26	Peserta Bimtek Batik Lanjutan di Sidorejo	Orang	20	20	100%
27	Peserta Bimtek dan Pendampingan GMP	Orang	20	20	100%
28	Peserta Bimtek dan Pendampingan HKI	Orang	30	30	100%
29	Peserta Bimtek Diversifikasi Produk	Orang	60	60	100%
30	Peserta Bimtek Fiberglass Karang Taruna Melati di Sendangadi	Orang	20	20	100%
31	Peserta Bimtek Keamanan Pangan dan Produk Halal	Orang	60	60	100%
32	Peserta Bimtek Kemasan	Orang	60	60	100%

No	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
33	Peserta Bimtek Kerajinan Rajut di Gempol, Condongcatur	Orang	20	20	100%
34	Peserta Bimtek Kerajinan Rajut di Sono Kulon, Merdikorejo	Orang	20	20	100%
35	Peserta Bimtek Komunikasi Publik	Orang	20	20	100%
36	Peserta Bimtek Kue Basah dan Kering di Minomartani	Orang	40	40	100%
37	Peserta Bimtek Kue Basah dan Kering di Sendangadi	Orang	20	20	100%
38	Peserta Bimtek Kue Basah dan Kering di Sendangmulyo	Orang	20	20	100%
39	Peserta Bimtek Kue Basah dan Kering di Sidoarum	Orang	20	20	100%
40	Peserta Bimtek Kue Basah dan Kering di Sinduadi	Orang	20	20	100%
41	Peserta Bimtek Kue Basah dan Kering di Soka Tegal, Merdikorejo	Orang	20	20	100%
42	Peserta Bimtek Manajemen Usaha Industri	Orang	40	40	100%
43	Peserta Bimtek Pasir Semen di Sidoagung	Orang	20	20	100%
44	Peserta Bimtek Sablon di Banyurejo	Orang	20	20	100%
45	Peserta Bimtek Sablon di Kaliurang Barat, Hargobinangun	Orang	20	20	100%
46	Peserta Bimtek Sablon di Kaliurang Timur, Hargobinangun	Orang	20	20	100%
47	Peserta Bimtek Sablon di Minomartani	Orang	20	20	100%
48	Peserta Bimtek Sablon di Pangukrejo,	Orang	20	20	100%

No	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Umbulharjo				
49	Peserta Bimtek Sablon di Sendangsari	Orang	20	20	100%
50	Peserta Bimtek Sablon di Sidorejo	Orang	20	20	100%
51	Peserta Bimtek Sablon di Sidorejo, Umbulharjo	Orang	20	20	100%
52	Peserta Bimtek Sablon di Sumberarum	Orang	20	20	100%
53	Peserta Bimtek Sablon di Wukirharjo	Orang	20	20	100%
54	Peserta Bimtek Sablon Karang Taruna Melati di Sendangadi	Orang	20	20	100%

Permasalahan yang dihadapi pada sub kegiatan ini adalah:

- Pembinaan bimbingan teknis yang dilakukan hanya sebatas transfer ilmu dan ketrampilan dari instruktur kepada peserta bimtek. Untuk menunjang keberlangsungan paska pelaksanaan bimtek dibutuhkan alat-alat untuk menunjang produksi
- Jumlah pelaksanaan bimtek pada tahun 2022 yang cukup banyak menjadikan jadwal pelaksanaan harus direncanakan dengan matang dan *rigid* sehingga seminimal mungkin tidak terjadi pergeseran jadwal pelaksanaan yang menyebabkan pelaksanaan bimtek secara keseluruhan akan menjadi terganggu
- Capaian program penanggulangan kemiskinan yang ditargetkan jumlah peserta bimtek yaitu sejumlah 20% tidak tercapai

Solusi yang telah dilakukan berupa:

- Mengarahkan kepada peserta pelatihan untuk mengajukan bantuan peralatan produksi melalui jalur BKK (Bantuan Keuangan Khusus)
- Mengkomunikasikan jadwal pelaksanaan bimtek kepada *stakeholder* terkait (Anggota DPRD, Kapanewon, Kalurahan, instruktur bimtek) minimal satu bulan sebelum pelaksanaan bimtek sehingga ada waktu

yang cukup longgar untuk koordinasi demi kelancaran pelaksanaan bimtek

- Realisasi peserta bimtek pengembangan produksi yang tergolong sebagai KKM / KRM yaitu 15,23%. Peserta bimtek yang direkrut diprioritaskan untuk peserta yang masih tergolong sebagai pemuda / pemudi (di bawah 30 tahun) dan/atau usia produktif.

2. Program Pengendalian Usaha Industri Kabupaten/Kota

Program ini merupakan program pada bidang Perindustrian yang terdiri dari satu kegiatan .dan satu sub kegiatan.

Pada tahun 2022 program ini dianggarkan sebesar Rp.7.112.500,00, dan dapat direalisasikan sebesar Rp.7.008.600,00 atau dapat dikatakan tercapai 98,5%. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program adalah Jumlah pelaku usaha industri yang mempunyai izin berlaku sesuai dengan ketentuan: 1.173 pelaku usaha industri. Adapaun realisasinya adalah 1.217 pelaku usaha industri, tercapai 103,75%:

Dalam melaksanakan program tersebut ditemukan permasalahan seringnya dijumpai pemohon perizinan sektor industri sudah merasa mengisi form di OSS RBA secara lengkap akan tetapi tidak bisa terbaca oleh admin yang ada di OPD teknis.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah melakukan upaya solusi pendampingan kepada pemohon baik melalui on-line maupun off-line ataupun keduanya

- a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota

Kegiatan ini terdiri atas satu sub kegiatan di Bidang Perindustrian yang berkaitan dengan verifikasi pelaku usaha dan pengawasan usaha.

Anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp.7.112.500,00, dan dapat direalisasikan sebesar Rp.7.008.600, atau dapat dikatakan tercapai 98,5%

Indikator Kinerja kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan

Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota adalah IKM pangan yang diawasi: 35 IKM dapat direalisasikan 35 IKM sehingga tercapai kinerja 100%.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, permasalahan dihadapi adalah seringnya dijumpai pemohon perizinan sektor industri sudah merasa mengisi form di OSS RBA secara lengkap akan tetapi tidak bisa terbaca oleh admin yang ada di OPD teknis.

Solusi yang dilakukan adalah pendampingan kepada pemohon baik melalui on-line maupun off-line ataupun keduanya.

- i. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota.

Sub Kegiatan ini digunakan untuk pengawasan IKM pangan dan verifikasi pelaku usaha.

Anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp.7.112.500,00, dan dapat direalisasikan sebesar Rp.7.008.600, atau dapat dikatakan tercapai 98,5%.

Indikator, target dan realisasi keluaran Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota adalah sebagai berikut:

Tabel 2.30. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota

No	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	IKM pangan yang diawasi/BTP	IKM	35	35	100%
2	pelaku usaha yang di verifikasi	pemohon	20	20	100%

Permasalahan yang dihadapi pada sub kegiatan ini adalah:

- Masih sering ditemukan ketidaksesuaian standard dari IKM pangan dalam hal: tata letak produksi, peralatan, penyediaan air bersih, fasilitas higiene sanitasi, higiene karyawan, pengemasan, pelabelan dan penyimpanan.
- Kurang cepatnya pemohon memenuhi perbaikan-perbaikan baik administrasi maupun teknis ketika hasil proses verifikasi sudah keluar hasilnya.

Solusi yang telah dilakukan berupa:

- Melakukan pendampingan secara terus menerus kepada IKM olahan pangan dengan melibatkan instansi lain dalam hal ini Dinas Kesehatan maupun Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
- Melakukan pendampingan dan tindak lanjut hasil perbaikan yang dipersyaratkan dalam verifikasi teknis perizinan sektor perindustrian

3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Program ini merupakan program pada bidang Perindustrian yang terdiri dari satu kegiatan dan satu sub kegiatan.

Pada tahun 2022 program ini dianggarkan sebesar Rp.90.000.000,00, dan dapat direalisasikan sebesar Rp.89.850.200,00, atau dapat dikatakan tercapai 99,8%. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program adalah Persentase data industri yang dimutakhirkan:100%. Adapun realisasinya adalah 100%, tercapai 100%:

Dalam melaksanakan program tersebut ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- Kegiatan pendataan masuk dalam anggaran perubahan sehingga proses pendataan kurang optimal
- Data dari kapanewon kurang optimal dalam melengkapi form isian data yang dibagikan baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy*

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah melakukan upaya-upaya solusi sebagai berikut:

- a. Mengolah data yang masuk dengan seoptimal mungkin dengan melakukan verifikasi, validasi dan pengolahan data.
- b. Melakukan verifikasi ulang terhadap kapanewon yang dinilai mengirimkan data kurang jelas dan lengkap.

- a. Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
Kegiatan ini terdiri atas satu sub kegiatan di Bidang Perindustrian yang berkaitan dengan penyusunan buku data industri.

Anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp.90.000.000,00, dan dapat direalisasikan sebesar Rp.89.850.200,00, atau dapat dikatakan tercapai 99,8%

Indikator Kinerja kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota adalah Buku industri Kabupaten Sleman: 20 buku dapat direalisasikan 20 buku sehingga tercapai kinerja 100%.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, permasalahan yang dihadapi adalah hasil penyusunan Buku data yang kurang optimal dikarenakan pelaksanaan pendataan diakhir tahun.

Solusi yang dilakukan adalah verifikasi dan validasi ke kapanewon tidak hanya dilakukan sekali hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang mencerminkan kondisi sebenarnya.

- i. Sub Kegiatan Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas.

Sub Kegiatan ini digunakan untuk penyusunan Buku Data Industri Kabupaten Sleman.

Anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp.90.000.000,00, dan dapat direalisasikan sebesar Rp.89.850.200,00, atau dapat dikatakan tercapai 99,8%.

Indikator dan target keluaran Sub Kegiatan Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas adalah

Buku industri Kabupaten Sleman: 20 buku dapat direalisasikan 20 buku sehingga tercapai kinerja 100%.

Permasalahan yang dihadapi pada sub kegiatan ini adalah hasil penyusunan Buku data yang kurang optimal dikarenakan pelaksanaan pendataan diakhir tahun.

Solusi yang telah dilakukan berupa verifikasi dan validasi ke kapanewon tidak hanya dilakukan sekali hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang mencerminkan kondisi sebenarnya.

BAB III CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI

A. IKK URUSAN PERDAGANGAN

1. Indikator Kinerja Kunci Outcome: Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)

Definisi Operasional: Mengukur persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)

Rumus IKK:

$$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah pelaku usaha di wilayah kab/kota}} \times 100\%$$

Capaian Kinerja:

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman tidak dapat menyajikan data ini dikarenakan data tentang perizinan terdapat di Dinas DPMPSTSP.

2. Indikator Kinerja Kunci Outcome: Persentase kinerja realisasi pupuk

Definisi Operasional: Mengukur persentase kinerja realisasi pupuk

Rumus IKK:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{RDKK}} \times 100\%$$

Capaian Kinerja:

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman tidak dapat menyajikan data ini dikarenakan data tentang pupuk terdapat di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

3. Indikator Kinerja Kunci: Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku

7	Timbangan Elektronik	241
8	Pompa Ukur BBM	420
9	Meter Taksi	347
JUMLAH		60927

REALISASI BDKT 2022

REALISASI BDKT 2022

No	Nama	Jenis BDKT	Jumlah uji sampel	Kuantitas		Pelabelan	
				Diterima	Ditolak	Sesuai	Tidak Sesuai
1	Dhiafa Jaya	Egg Roll Original	12	✓		✓	
2	Kentunk	Kentang Serut	15	✓		✓	
3	Yahood	Keripik Jamur Tiram	9	✓			✓
4	Crezz Crezz	Mete Goreng	5	✓			✓
5	Larizy Cookies	Kue Kering	15		✓		✓
6	Tunas Jingga	Jahe Merah Instan 23 g	15		✓	✓	
7	Tunas Jingga	Jahe Merah Instan 250 g	7	✓		✓	
8	Tunas Jingga	Jahe Merah Instan 150g	4	✓		✓	
9	Dapur Wiliarda	Onde-onde Ketawa 250 g	5		✓		✓
10	Dapur Wiliarda	Onde-onde Ketawa 200 g	3		✓		✓
11	Pawone Akio	Sambal Baby Cumi	15	✓			✓
12	Popo	Jamur Crispy	7	✓			✓
13	Salfin	Salmon Fish Skin Chips	13	✓			✓
14	Salfin	Kakap Fish Skin Chips	13	✓			✓
15	Yufa	Kripik Bakso	8	✓			✓
16	Surya	Emping Mlinjo	16		✓		✓
17	CV Sahabat Terna	Susuka Susu Kambing	2	✓			✓
18	Teges	Teh Kelor	2		✓	✓	
Jumlah			162	12	6	6	12

Persentase diterimanya kuantitas BDKT	$\frac{\text{Jumlah produk yang kuantitasnya diterima}}{\text{Jumlah total produk}} \times 100\% = \frac{12}{18} \times 100\% = 67\%$
---------------------------------------	---

Tindak lanjut: UMKM pemilik UTPP disarankan untuk membawa alat UTPP-nya ke kantor UPTD Pelayanan Metrologi Legal untuk ditera/tera ulang

Persentase kesesuaian pelabelan	$\frac{\text{Jumlah produk yang penulisan labelnya sesuai}}{\text{Jumlah total produk}} \times 100\% = \frac{6}{18} \times 100\% = 33\%$
---------------------------------	--

Tindak lanjut: UMKM disarankan untuk menyesuaikan pencantuman label kuantitas sesuai dengan ketentuan Permendag No.31 Tahun 2011 tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus

Sleman,
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Dra. RR. MAE RUSMI S, M.T.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19660529 199303 2 004

B. IKK URUSAN PERINDUSTRIAN

1. Indikator Kinerja Kunci Outcome: Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota

Definisi Operasional: Mengukur tingkat pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota

Rumus:

$$\frac{\text{Jumlah industri kecil dan menengah tahun}_n - \text{Jumlah industri kecil dan menengah tahun}_{n-1}}{\text{Jumlah industri kecil dan menengah tahun}_{n-1}} \times 100\%$$

Capaian Kinerja:

$$= \frac{11.540 - 11.414}{11.414} \times 100\% = 1,1\%$$

Raportisasi Perusahaan Industri kecil dan Industri Dasar Menengah per Kapanewon di Kabupaten Sleman

NO.	KECAMATAN	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
		IK	ISM	IK	ISM	IK	ISM	IK	ISM	IK	ISM	IK	ISM
1	MOYUDAN	2.107	-	2.110	-	2.110	-	1.232	-	1.195	-	1.203	-
2	MINGGIR	1.764	-	1.767	-	1.767	-	1.309	-	794	-	806	-
3	SEYEGAN	1.814	3	1.816	3	1.816	5	974	5	841	5	851	5
4	GODEAN	1.980	1	1.985	1	1.985	4	1.286	4	1.107	5	1.118	5
5	GIAMPING	838	18	842	19	843	22	502	22	740	23	747	23
6	MLATI	1.111	29	1.119	29	1.119	34	669	34	513	34	518	34
7	DEPOK	762	27	767	31	767	34	496	34	327	35	330	35
8	BERBAH	426	6	440	6	429	7	314	7	570	7	578	7
9	PRAMBANAN	316	5	326	6	328	6	228	6	239	6	244	6
10	KALASAN	741	25	749	26	759	32	524	34	626	34	629	35
11	NGEMPLAK	623	5	628	5	642	6	440	8	608	8	612	10
12	NGAGLIK	842	18	851	18	855	20	596	19	547	19	552	20
13	SLIMAN	759	19	762	21	765	24	513	22	842	22	849	22
14	TEMPEL	1.738	2	1.741	2	1.745	3	1.058	3	772	3	742	4
15	TURI	547	1	552	1	562	1	386	1	681	1	686	2
16	PAKEM	393	6	397	7	402	7	278	8	606	8	614	8
17	CANGKRINGAN	464	-	469	-	475	1	328	2	265	2	274	2
TOTAL		16.735	163	16.830	175	16.898	206	11.153	209	11.233	212	11.353	218

Raportisasi Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri kecil dan Industri Dasar Menengah per Kapanewon di Kabupaten Sleman

NO.	KECAMATAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	MOYUDAN	6.332	6.341	6.341	4.945	2.926	2.946
2	MINGGIR	3.881	3.888	3.888	3.033	1.862	1.875
3	SEYEGAN	5.387	5.393	5.420	4.228	4.494	4.509
4	GODEAN	5.314	5.327	5.374	4.192	4.480	4.493
5	GIAMPING	5.207	5.232	5.312	4.141	4.690	4.707
6	MLATI	5.131	5.188	5.422	4.229	4.082	4.100
7	DEPOK	4.878	4.709	5.425	4.227	4.137	4.152
8	BERBAH	3.460	3.561	3.571	2.785	2.884	2.904
9	PRAMBANAN	1.042	1.075	1.075	839	1.311	1.321
10	KALASAN	5.144	5.216	5.278	4.195	4.755	4.853
11	NGEMPLAK	1.673	1.686	1.589	1.551	1.938	2.158
12	NGAGLIK	5.031	5.085	5.152	4.019	3.698	3.793
13	SLIMAN	6.089	6.121	6.080	6.770	6.485	6.497
14	TEMPEL	4.566	4.577	4.580	3.572	3.190	3.280
15	TURI	1.185	1.196	1.196	933	1.590	1.670
16	PAKEM	1.391	1.405	1.405	1.096	2.399	2.406
17	CANGKRINGAN	737	747	763	595	677	692
TOTAL		68.268	68.749	70.971	55.352	55.592	56.860

Mengetahui
Kepala Bidang Perindustrian

Dwi Wulandari, ST., M.Ec. Dev
NIP. 19701029 199803 2 004

* Jumlah data ditabel tersebut termasuk jumlah industri besar

2. Indikator Kinerja Kunci Outcome: Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK

Definisi Operasional: Mengukur persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK

Rumus:

Jika terdapat N indikator pembangunan industri dalam RPIK maka nilai masing-masing bobot indikator adalah $(100/N)\%$

Untuk masing-masing penilaian indikator adalah persentase capaian indikator dibagi target dikali $(100/N)\%$

Nilai akhir adalah akumulasi dari N indikator tersebut

Capaian Kinerja:

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman belum dapat menyajikan data capaian dikarenakan RPIK sedang akan disusun pada tahun 2023.

3. Indikator Kinerja Kunci Outcome: Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait

Definisi Operasional: Mengukur persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait

Rumus:

$$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$$

Capaian Kinerja:

$$\frac{22}{22} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Catatan: sejak berlakunya OSS-RBA, sudah tidak ada lagi Izin Usaha Industri, diganti dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan tingkat risiko sektor

perindustrian sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
5 (lima) digit.

Hari/Tanggal	Nama	Alamat	Tenaga Kerja	KBLI	IZIN
3 Januari 2022	Widodo	Karangmojo RT 04 RW 02 Tamanmartani, Kalasan, Sleman	2	10750 Industri Makanan dan Masakan Olahan	NIB 2211210022399
3 Januari 2022	Samsini	Karangmojo RT 01 RW 01 Tamanmartani, Kalasan, Sleman	2	10750 Industri Makanan dan Masakan Olahan	NIB 2211210024605
3 Januari 2022	Sri Hartanti	Karangmojo RT 01 RW 01 Tamanmartani, Kalasan, Sleman	2	10750 Industri Makanan dan Masakan Olahan	NIB 2511210032508
5 Januari 2022	Sudarsono	Bogem RT 09 RW 03 Tamanmartani, Kalasan, Sleman	3	10750 Industri Makanan dan Masakan Olahan	NIB 2211210025586
5 Januari 2022	Sumaryati	Karangmojo RT 03 RW 02 Tamanmartani, Kalasan, Sleman	2	10130 Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan D	NIB 1711210042951
5 Januari 2022	Yusuf Nursidiq	Kepatihan RT 02 RW 01 Tamanmartani, Kalasan, Sleman	2	10750 Industri Makanan dan Masakan Olahan	NIB 0220104852563
10 Januari 2022	Wahyu Triyono	Tegalrejo, Tamanmartani, Kalasan, Sleman	2	10750 Industri Makanan dan Masakan Olahan	NIB 2906210049219
10 Januari 2022	Setyaningsih	Tulung RT 04 RW 02 Tamanmartani, Kalasan, Sleman	2	10750 Industri Makanan dan Masakan Olahan	NIB 2211210020847
10 Januari 2022	Ulfatussodah	Kenaja RT 08 RW 02 Tamanmartani, Kalasan, Sleman	2	10750 Industri Makanan dan Masakan Olahan	NIB 2211210017326
12 Januari 2022	Wiwik Setyonni	Randugunting RT 08 RW 03 Tamanmartani, Kalasan, Sleman	2	10750 Industri Makanan dan Masakan Olahan	NIB 2211210015267
12 Januari 2022	Tni Mohyani	Kowang RT 01 RW 01 Tamanmartani, Kalasan, Sleman	2	10750 Industri Makanan dan Masakan Olahan	NIB 2211210026723
14 Januari 2022	Nurchayanto Slamet Riyadi	Sidorejo, Selomartani, Kalasan, Sleman	2	45201 Reparasi Mobil	NIB 2409210042394
14 Januari 2022	Kuma Wiryadimulya	Jamburejo, Selomartani, Kalasan, Sleman	2	23911 Industri Bata, Mortar, Semen, dan Sejenisnya yang Tahan A	NIB 0311210003735
14 Januari 2022	Untung Raharjo	Kertrejo Sambirejo, Selomartani, Kalasan, Sleman	2	10750 Industri Makanan dan Masakan Olahan	NIB 0309210015896
17 Januari 2022	Irma Rochmaniyati	Keringan, Wonokerto, Turi, Sleman	2	45407 Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor	NIB 2011210003767
17 Januari 2022	Diah Wdhyaniti	Ngumbul No 37, Kelor RT 03/026 Bangunkerto, Turi, Sleman	2	13921 Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah Tangga	NIB 9120104580266
19 Januari 2022	Sani Isnanta	Dalem RT 03 RW 22 Grikerto, Turi, Sleman	1	18113 Industri Pencetakan 3D Printing	NIB 3110210013613
19 Januari 2022	Partini	Ledokongko Bangunsari RT 05 RW 10 Bangunkerto, Turi, Sleman	2	10590 Industri Pengolahan Produk dan Susu Lainnya	NIB 2010210000649
2 Maret 2022	KA SRI ASTUTI	Watulangkah RT001 RW036 Ambarketawang Gamping, Sleman	2	28264 Industri Jarum Mesin Jahit, Rajut, Bordir Dan Sejenisnya	NIB 1010210004619
2 Maret 2022	NATALIA DESKY NUR ADIANTI	Jl. Margi Siswo RT 03/RW 03 Meyjing Lor Ambarketawang, Gamping	1	10750 Industri Makanan dan Masakan Olahan	NIB 1510210039504
2 Maret 2022	NOR HIDAYATULIKHAH	Meyjing Lor 001/001 Ambarketawang, Gamping, Sleman	2	10750 Industri Makanan dan Masakan Olahan	NIB 120207462427
2 Maret 2022	WENSENSIUS SUYOKO	Deingsari 002/014 Ambarketawang, Gamping, Sleman	2	45407 Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor	NIB 2009210025413
2 Maret 2022	MONIKA ANDIARSARI	Kramat RT18/ Rw08, Sidorejo, Godoran, Sleman	1	20129 Industri Pupuk Lainnya	NIB 1287000232529

Dipindai dengan CamScanner

8 Maret 2022	TRI SANGDAH	Candran Rt 12 Rw 05 Sidoarum, Godoran, Sleman	2	10750 Industri Makanan dan Masakan Olahan	NIB 120207462427
11 Maret 2022	DWI NURMAWATI	Kronggahan Rt 03 RW 008 Trihanggo, Gamping, Sleman	2	45407 Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor	NIB 1011210017485
11 Maret 2022	SUSILASTRI	Trini Trihanggo, Gamping, Sleman	2	17022 Industri Kemasan Dan Kotak Dari Kertas Dan Karton	NIB 1220000310261
11 Maret 2022	PT SELARAS SEJATI MATARAM	Baturan, Trihanggo, Gamping, Sleman	5	45201 Reparasi Mobil	NIB 2411210025713
11 Maret 2022	MUTIARA MAYA Satriani	Jl. Jambon Perum Griya Baturan Atri 1 No. 14 RT 003 RW 03 Banteran No 22 Rt 04 Rw 26 Donoharjo, Ngaglik, Sleman	3	17022 Industri Kemasan Dan Kotak Dari Kertas Dan Karton	NIB 1609210047455
14 Maret 2022	SAMIASIH	Banteraan 04/26Kel Donoharjo, Kec Ngaglik, Kab Sle	2	10750 Industri Makanan dan Masakan Olahan	NIB 022010071787
14 Maret 2022	RUSDIHAH	Banteraan Rt 004 Rw 025 Donoharjo, Ngaglik, Sleman	2	10750 Industri Makanan dan Masakan Olahan	NIB 1211110005906
14 Maret 2022	ESTRI UTAMI	Kropak Rt 10 Rw 21 Trihanggo, Sleman	2	10750 Industri Makanan dan Masakan Olahan	NIB 022030362955
15 Maret 2022	RISA SADIJA	Somodaran Rt 03 Rw 10 Banyuraden, Gamping, Sleman	2	10750 Industri Makanan dan Masakan Olahan	NIB 2909210036555
15 Maret 2022	NURMAYANTI	Somodaran Rt 03 Rw 10 Banyuraden, Gamping, Sleman	2	10750 Industri Makanan dan Masakan Olahan	NIB 2909210008346
15 Maret 2022	AGNI RAHAYUNINGSIH	Somodaran Rt 5 Rw 10 No 159AK Banyuraden, Gamping, Sleman	2	10750 Industri Makanan dan Masakan Olahan	NIB 2909210010743
15 Maret 2022	TITIN WINARSIH	Somodaran Banyuraden, Gamping, Sleman	2	10750 Industri Makanan dan Masakan Olahan	NIB 2510210031031
15 Maret 2022	WIDI WIDYAWATI	Mancasan, Ambarketawang, Gamping, Sleman	2	10750 Industri Makanan dan Masakan Olahan	NIB 2610210036323
17 Maret 2022	SAPTONO BATU ANGGORO	Jl. Wunguadi No 14 Ambarketawang, Gamping, Sleman	1	10750 Industri Makanan dan Masakan Olahan	NIB 1908210035583
17 Maret 2022	FITRI HARYANTI S SOS	Pundung Rt 05 Rw 26 Nogotirto, Gamping, Sleman	2	10750 Industri Makanan dan Masakan Olahan	NIB 1908210026044
18 Maret 2022	PURWANTI	Pundung Rt 05 Rw 26 Nogotirto, Gamping, Sleman	2	10750 Industri Makanan dan Masakan Olahan	NIB 0910210008424
18 Maret 2022	ROKI BEGASARI	Pundung Rt 05 Rw 26 Nogotirto, Gamping, Sleman	2	10750 Industri Makanan dan Masakan Olahan	NIB 1210210030544
18 Maret 2022	NUGRAHWATI	Pundung Rt 05 Rw 26 Nogotirto, Gamping, Sleman	2	10750 Industri Makanan dan Masakan Olahan	NIB 21021004415
21 Maret 2022	PT ROSAGRIYA PARILEYYA INTERINDA	Perum Tirtasari Blok E-02 RT 004 RW 019 Trihanggo, Gamping, Sleman	3	74119 Aktivitas Desain Industri Lainnya	NIB 1410210032209
21 Maret 2022	ROSIANA	BRU RT 06 RW 31 Trihanggo, Gamping, Sleman	2	10750 Industri Makanan dan Masakan Olahan	NIB 1230210030644
21 Maret 2022	MUTABARITUN NISA	Padepokan Bhumi Retawu, Jl Kapten Haryadi, Dayakan, Sardonoharjo, Sleman	2	10750 Industri Makanan dan Masakan Olahan	NIB 1910210021813
23 Maret 2022	JOKO HARTONO	Miang GP IV/159 RT006 RW033 Nogotirto, Gamping, Sleman	2	45407 Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor	NIB 0910210005814
23 Maret 2022	SITI PARINTEN	Miang RT 04 RW 32 Nogotirto, Gamping, Sleman	2	14302 Industri Pakaiatn Jadi Sulaman/Bordir	NIB 1510210004279
23 Maret 2022	SITI HATI RIDWAN	Miang RT 05 RW 33Nogotirto, Gamping, Sleman	2	10750 Industri Makanan dan Masakan Olahan	NIB 1510210039514
23 Maret 2022	MUNAWAROH	Miang RT 05 RW 33Nogotirto, Gamping, Sleman	2	10750 Industri Makanan dan Masakan Olahan	NIB 2508210030117
7 Juni 2022	SUPOMO	Jalan raya layem dero jls wedomartani, ngemplak, sk	1	45407 Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor	NIB 0509210007969
7 Juni 2022	ANA SUGYANTO	Bakungan, Wedomartani, Ngemplak, Sleman	2	45407 Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor	NIB 2411210008475
7 Juni 2022	LILIK OCTA SETYAWAN	Jl. Losari, Wonosari RT 06 RW 09 Sukoharjo, Ng	2	45201 Reparasi Mobil	

Dipindai dengan CamScanner

4. Indikator Kinerja Kunci Outcome: Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait

Definisi Operasional: Mengukur persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait

Rumus:

$$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeularkan}} \times 100\%$$

Capaian Kinerja:

Tahun 2023 tidak terdapat permohonan rekomendasi Izin Perluasan Industri yang masuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan

5. Indikator Kinerja Kunci Outcome: Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota

Definisi Operasional: Mengukur persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang dikeluarkan oleh instansi terkait

Rumus:

$$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeularkan}} \times 100\%$$

Capaian Kinerja:

Di Kabupaten Sleman tidak terdapat Kawasan Industri

6. Indikator Kinerja Kunci Outcome: Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini

Definisi Operasional: Mengukur ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini

Rumus:

a. Keterkinian informasi industri:

- Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%)

- Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%)
- Tidak menyampaikan informasi industri (0%)

b. Kelengkapan informasi industri meliputi :

- Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%)
- Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%)
- Informasi bahan bakar/energi (10%)
- Informasi tenaga kerja (10%)
- Informasi investasi (10%)

Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1+2)

Capaian Kinerja:

Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%)

Kelengkapan informasi industri meliputi :

- Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) : Rp.2.565.024.977,78
- Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%): Rp 1.389.368.500,49
- Informasi tenaga kerja (10%): 56.360 orang
- Informasi investasi (10%): Rp 532.134.458,63

Capaian kinerja untuk Indikator Kinerja 2022 pada Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tersedianya Informasi Industri secara Lengkap dan terkini datanya sebagai berikut:

- Tersedianya Informasi Industri dengan batas waktu 0-6 bulan: tidak ada (0%)
- Tersedianya Informasi Industri dengan batas waktu 7-12 bulan: ada (25%)
- Tidak Menyampaikan Informasi Industri: tidak ada (0%)
- Informasi Produksi dan Kapasitas Produksi: ada (10%)
- Informasi bahan baku dan bahan penolong: ada (10%)
- Informasi bahan bakar/energi: tidak ada (0%)
- Informasi tenaga kerja: ada (10%)
- Informasi investasi: ada (10%)

JUMLAH: 65%

BAB IV CAPAIAN PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN DANA KEISTIMEWAAN

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman tidak mendapatkan alokasi Tugas Pembantuan maupun Dana Keistimewaan

BAB V TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ TAHUN ANGGARAN 2021

Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sleman Tahun Anggaran 2021, terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman, yaitu:

Tabel 5.1. Tindak Lanjut Tahun 2021 dan 2022 terhadap Rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Tahun 2021

No	Rekomendasi DPRD	Hal yang sudah dilakukan pada tahun anggaran 2021	Tindak Lanjut pada Tahun Anggaran 2022
1	Indeks Kualitas Air (IKA) rendah, salah satunya disebabkan oleh perilaku masyarakat dan industri dalam membuang limbah ke sungai tanpa pengolahan terlebih dahulu. Oleh karena itu, pengolahan daerah aliran sungai, termasuk kualitas air didalamnya, harus dilakukan secara terpadu, meliputi bagian hulu, tengah dan hilir sungai tanpa berhambur oleh batas-batas administrasi	melakukan pengawasan dan pengendalian perijinan di dalamnya termasuk pengendalian lingkungan bagi yang sudah ber-NIB	melakukan pengawasan dan pengendalian perijinan di dalamnya termasuk pengendalian lingkungan bagi yang sudah ber-NIB
2	Perlu terobosan baru dalam memfasilitasi kreatifitas dan inovasi yang tumbuh di tengah masyarakat dan karyanya berpotensi dapat membuka lapangan kerja baru dan menyerap tenaga kerja.	Melalui program Rumah Kreatif Sleman dilakukan coaching dan mentoring, telah dilakukan pula fasilitasi kemitraan antara pelaku industri kecil dengan pelaku industri menengah besar dalam hal teknologi dan pemasaran	Melanjutkan program tahun 2021

BAB VI PENUTUP

Selain sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan, Laporan Pelaksanaan Tugas Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman Tahun 2022 ini juga menjadi suatu bahan evaluasi agar pelaksanaan tugas ke depan mampu menjadi lebih baik. Hal tersebut menjadi penting terutama karena pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak terlepas dari berbagai kendala dan permasalahan selain perkembangan dinamika sektor industri dan perdagangan ke depan yang memerlukan suatu langkah antisipatif maupun proaktif.

Dari evaluasi atas capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2022, Dinas Perindustrian dan Perdagangan diharapkan dapat melakukan perbaikan perencanaan, mapupun pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk perbaikan kinerja.

LAMPIRAN

1. Dokumen Pendukung Indikator Kinerja Kunci
2. Formulir Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2022
3. Data Inovasi Perangkat Daerah
4. Data Prestasi Perangkat Daerah